

Rizal Ramli: Sang Penerobos

# AKTUAL

Edisi 38 | 15 - 31 Juli 2015

## THE RESHUFFLE

Pertumbuhan ekonomi yang jauh dari harapan, nilai tukar Rupiah yang melemah dan tidak solidnya partai pendukung hingga menteri yang membangkang menjadi alasan perombakan kabinet. Siapa yang akan tersingkir?



ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

تقبل الله منا و منكم

Maaf...  
Adalah kunci  
bebaskan benci  
dalam hati



Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah  
**Mohon Maaf lahir dan Batin**

**AKTUAL**  
MAGAZINE

Caprof Media Regali  
enlightenment and harmony

**aktual.com**  
ONLINE NEWS - VIDEO NEWS - MAGAZINE

**PENDIRI** M Danial Nafis

**KOMISARIS** Yudi Latif

**PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief

**SEKRETARIS REDAKSI** Hanny Haniffa

**REDAKTUR SENIOR** Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi, Nia S Amira

**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony

**DIREKTUR MAJALAH** Wahyu Romadhony

**REDAKTUR** Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito, Ismed Eka Kusuma

**ASISTEN REDAKTUR** Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana, Tri Harningsih

**STAF REDAKSI** Soemitro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlan (Majalah), Fahrul Anwar, Fadlan Syam Butho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Nicha Muslimawati, Munzir (Foto), Junaidi Mahbub (Foto), Warnoto (TV)

**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, Nelson Nafis

**HEAD IT DIVISION:** Yudhi Astira

**NETWORK:** Tri Wahyudi (Hd), Dewanta, Rendra

**SMC:** Resya Muhammad Irgi (Hd), Imelda, Taufik, Helmy Aziz, Iqbal Maulana

**KONTRIBUTOR LUAR NEGERI** Fitra Ismu (Meksiko)

**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makassar), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Bobby Andalan (Denpasar), Joko Pramono (Lumajang Jatim)

**DIREKTUR OPERASIONAL** Rinrin Sukmariana

**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah

**STAF KEUANGAN** Zulkarnain, Vinka

**SIRKULASI** Widhi Maulana, Bayu Aji

**MARKETING OFFICER** Ranie Anggoro, Rhiza Aditya

**ALAMAT REDAKSI**

PT Caprof Media Negeri  
Jl. Tebet Barat VIII No. 50  
Tebet, Jakarta Selatan, 12810  
No Telp : (021) 83794508  
Fax : (021) 83794706  
Email : majalah@aktual.co  
marketing@aktual.co

**aktual.com**  
TERHANCAT TERPERCAYA

**aktual**  
0101



# Pilihan Jokowi

Apakah perombakan kabinet akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi? pertanyaan seperti itu saat ini penting dijawab pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pergantian figur menteri dalam Kabinet Kerja bisa jadi tidak banyak berpengaruh pada kondisi dalam negeri. Palsanya hingga kini banyak kementerian yang tidak bisa berbuat banyak. Perubahan nomenklatur yang tak kunjung selesai menjadi penyebabnya.

Kondisi diperparah dengan situasi ekonomi dunia yang tengah bergolak. Bursa saham Tiongkok yang jatuh bulan ini tentu akan berpengaruh pada Indonesia. Apalagi pemerintah telah membangun komitmen untuk memperkuat lagi poros Indonesia-Tiongkok.

Komitmen hutang senilai US\$ 50 Milyar dari Asian Infrastructure Investment Bank

(AIIB) milik Tiongkok yang belum terealisasi membuat sejumlah proyek yang menjadi andalan pemerintah tidak tercapai. Situasi ini semakin runyam manakala soliditas kabinet terbukti rapuh.

Saling serang antar Menteri telah terjadi. Bahkan ada juga menteri yang dengan arogan menghina presiden di depan forum terbatas. Manuver politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka dapur pemerintah yang belum banyak bekerja. Persaingan kutub menteri profesional dan parpol sangat kasat mata.

Partai pendukung pemerintah menunggangi isu penghinaan sebagai pintu masuk reshuffle kabinet. Tarik ulur dan hitung-hitungan politik terus terjadi. Dalam situasi yang serba tidak pasti kelompok ekonom lama mencoba untuk kembali. Bagaimana Jokowi memilih? ■

## Laporan Utama

### 18 Bongkar Kabinet Hadapi Krisis

Lemahnya kinerja tim ekonomi pemerintah Jokowi-JK menjadi pusingan kisruh yang mendekati titik didih.



### 22 Rini Sudah Siap Pergi

Bukti rekaman penghinaan saat ini telah dikantongi oleh PDI-P. Rekaman berdurasi 15 menit itu tersebar di lingkup internal partai sekitar tiga minggu lalu.



### 26 Siapa Menyingkirkan Siapa

Presiden memang nampak sekali sibuk dengan perombakan kabinet. Pada tanggal 29 Juni juga menggelar pertemuan dengan ekonom di Istana Negara.



## 30 WAWANCARA

### Rizal Ramli: Sang Penerobos

Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Era Gus Dur, Rizal Ramli dikenal sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang berani namun tepat sasaran, berdasarkan kepentingan rakyat pada keputusannya. Bagaimana pandangan pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI) ini melihat krisis ekonomi yang berada di depan mata?



## 10 NASIONAL

### Mesin Mematikan Hercules Tua

Hasil penyelidikan TNI AU menyatakan matinya salah satu mesin pada pesawat menjadi penyebabnya.

## 14 POLITIK

### Kekalnya Politik Dinasti

Tercatat beberapa Wali Kota dan Bupati telah mundur dari jabatannya untuk memuluskan langkah pencalonan anggota keluarganya.

## 34 HUKUM

### 'Pak Bos' dalam Kepungan 5 Rasuah

Terhitung hingga kini ada lima kasus rasuah yang mengepung pemenang Konfensi Calon Presiden Partai Demokrat tersebut.

## 40 EKONOMI

### Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tergelincir

Bank Dunia melayangkan kritikan halus kepada pemerintah Indonesia dengan merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2015 dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen. Bukannya berbenah, tim ekonomi Presiden Jokowi-JK sibuk menyanggah.

## 46 GEOPOLITIK

### Indonesia dan Krisis Keuangan Global

Banyak analis dan pemerhati industri keuangan global menyatakan bahwa krisis keuangan global akan terjadi pada bulan September 2015.

## 48 GEOPOLITIK

### Revisi PP 41/1996, Pintu Masuk Menuju Kolonialisme Ekonomi

Kalau Presiden Jokowi benar-benar akan merevisi PP 41/1996 yang memungkinkan WNA memiliki aset di Indonesia, maka sempurnalah pihak asing dalam mewujudkan dua dari tiga sasaran pokok perang asimetris untuk menguasai wilayah tanah air kita secara geopolitik.

## 52 INTERNASIONAL

### Ketika ISIS Menantang Hamas

ISIS mengancam akan menaklukkan wilayah Jalur Gaza, Palestina. Alasannya, Hamas yang berkuasa di sana dianggap bersikap lunak pada Israel, dan tidak serius menerapkan "syariat Islam."

## 54 INTERNASIONAL

### "Ramadhan Berdarah" di Timur Tengah

Tiga aksi teror di bulan suci Ramadhan menunjukkan pola kekerasan yang sedang berkembang. Jika pun tidak terlibat langsung, ISIS dan gaya brutalitasnya seolah sudah menjadi sumber inspirasi bagi teroris.

3 Tatap Redaksi

5 Terkini

6 Kaki Hari

8 Lensa Aktual

12 Kilas Nasional

16 Kilas Politik

38 Kilas Hukum

44 Kilas Ekonomi

56 Kilas Daerah

58 Oase

## Ketum PKB : Perencanaan Anggaran Pemerintahan Jokowi Gagal

Perencanaan anggaran pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dinilai telah gagal. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.500 triliun tidak bisa diakses oleh rakyat.

"Buat PKB, APBN yang di atas Rp 1.500 triliun itu akan sangat sulit diakses oleh rakyat sesungguhnya, karena perencanaan telah gagal di dalam menyerap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat," kata Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Minggu (12/7).

Cak Imin, sapaannya, menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bagaimana nomenklatur dua lembaga tersebut berikut pola penerapan anggarannya.

PKB mendorong pemerintah merevolusi perkara pengelolaan keuangan negara. Bukan hanya revolusi mental yang memang diusung Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Revolusi pengelolaan anggaran ini merupakan komitmen PKB.

Mantan Menakertrans ini lantas mencontohkan pentingnya anggaran untuk penguatan situs gerakan antiterorisme, sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Akan tetapi penyerapannya sangat jauh dari harapan.

"Kenapa sih pemerintah nggak men-supply sedikit saja, dari Rp 1.500 triliun itu untuk membiayai situs antiterorisme, nggak banyak, puluhan juta lah, ratusan juta lah. Itu saja nggak mampu," kritiknya.

"Duit ada tapi nggak bisa nyata pelaksanaannya, air minum susah, air bersih tidak ada. Yang nyata-nyata saja susah dilaksanakan. Kadang-kadang duit itu 'mbulet' saja, karena sekali lagi: lemahnya perencanaan," lanjut Cak Imin. /Nailin In Sarah-Ant-Sumitro

## Petinggi KY Tersangka Pencemaran Nama Baik Hakim Sarpin



Badan Reserse dan Kriminal Polri menetapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Komisioner KY Taufiqurrahman Sauri sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Hakim hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi.

Nama hakim Sarpin mencuat setelah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praperadilan itu diajukan terkait keputusan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Keputusan inilah kali peretama tersangka KPK lolos dari jeratan hukum, sekaligus praperadilan pertama terhadap KPK. "Betul, terlapornya (Suparman dan Taufiqurrahman) sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kabareskrim, Komjen Pol Budi Waseso kepada wartawan, Jumat (10/7).

Budi Waseso sepertinya kikuk menyebut institusi dan jabatan Suparman dan Taufiqurrahman yang sangat strategis di Komisi Yudisial. Tampaknya, Bareskrim khawatir terjadi benturan antar instansi dalam kasus ini. "Jangan bicara institusinya. Apa pun, dia itu adalah pelaku. Jangan dikait-kaitkan proses hukum dengan lembaga tertentu," sergah pria yang akrab disapa Buwas.

Buwas membeberkan sejumlah alat bukti yang menguatkan penetapan tersangka, yakni tulisan di media masa yang menurut pelapor telah mencemarkan nama baiknya. Selain itu, pihak penyidik telah meminta keterangan saksi ahli bahasa, serta ahli pidana untuk menguatkan bukti-bukti sehingga dapat menetapkan dua orang itu sebagai tersangka.

Penyidik sudah menjadwalkan untuk memanggil kedua tersangka pekan depan, dan akan diperiksa sebagai tersangka. "Surat panggilan sudah kita kirim. Mudah-mudahan yang bersangkutan datang," tandas Buwas.

Sebelumnya, Bareskrim menerima laporan polisi dari Hakim Sarpin Rizaldi yang melaporkan Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki dan komisioner Taufiqurrohmah Syahuri ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik sesuai pasal 310 dan 311 KUHP.

Dalam laporan itu, Sarpin keberatan dengan komentar dan pernyataan negatif Ketua dan komisioner KY tersebut yang dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Suparman Marzuki maupun Taufiqurrohmah berusaha tenang menghadapi kasus ini. Taufiq mengaku akan kooperatif dalam menjalani proses hukum di Bareskrim Polri, termasuk dalam menghadapi pemeriksaan penyidik. "Ya iyalah! Panggilan polisi, kan polisi negara," kata Taufiq.

Hanya saja Taufiq berharap bulan puasa jangan sampai terganggu oleh proses penyidikan, lagipula momentum Idul Fitri bukan saat tepat untuk melakukan proses kasus. Apalagi dia juga sedang sibuk terkait sidang pleno penerimaan hakim.

Sebagai petinggi di KY, Suparman dan Taufiq akan mendapat bantuan dari instansinya dalam menghadapi proses hukum kasus ini. "Karena kita sedang menjalankan tugas kita dalam memberi informasi di era keterbukaan. Enggak bisa ditutup-tutupi," tandas Taufiq. /Soemitro



# Basis Spiritualitas Kemajuan

**M**encuatnya isu agama dalam politik kontemporer mestinya tidak boleh sekadar alat mendulang suara, melainkan sebagai pembuka jalan ke arah persoalan yang lebih substantif: mempersoalkan basis spiritualitas kemajuan bangsa.

Dalam *A Study of History*, sejarawan terkemuka Inggris, Arnold Toynbee, melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban. Pada setiap kasus, Toynbee mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Singkat kata, bangunan negara (dan peradaban) tanpa landasan transenden, ibarat bangunan istana pasir.

Studi Toynbee tersebut mengisyaratkan adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kemajuan bangsa dan peradaban. Samuel Huntington, dalam *Who Are We?*, menunjukkan hal menarik mengenai keberlangsungan Amerika Serikat (AS) sebagai negara adikuasa, dibandingkan dengan Uni Soviet. Di AS, urainya, "Agama telah dan masih merupakan sesuatu yang sentral, dan barangkali identitas yang paling sentral bagi bangsa Amerika" (Huntington, 2004:20). Huntington juga menunjukkan (2006) bahwa geografi peradaban yang mampu bertahan adalah geografi peradaban yang berbasis keyakinan/ketuhanan. Dalam kaitan antara corak keagamaan dan politik, Alexis de Tocqueville (1835/1998) dan Robert Putnam (2006) mewakili para ahli yang menunjukkan peran nilai-nilai keagamaan dalam mempengaruhi demokrasi.

Memang, ada faktor budaya

yang dipengaruhi oleh agama yang menjadi rintangan bagi kemajuan. Akan tetapi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor keyakinan memberikan kontribusi yang penting dalam proses demokrasi karena ia mempengaruhi aspek-aspek demokrasi itu sendiri. Tentu saja, banyak faktor yang ikut mempengaruhinya, sehingga dalam konteks mana agama menjadi rintangan dan dalam konteks mana pula ia menjadi pendorong kemajuan, merupakan hal yang harus dipertimbangkan.

Dalam kaitan itu, hendaklah disadari bahwa agama sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan yang suci (sacred) sedari awal memang mengandung kekuatan yang ambivalen: menakjubkan (enrapture) dan menghancurkan (annihilate). Kata "sacred" (Latin, sacer) itu sendiri bisa berarti karunia atau kutukan, suci atau cercaan.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksteriortas formalisme peribadan, tanpa kesanggupan mengali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagaman menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, conscious-intimacy, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmatikan misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan

atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Banyak penyeru menekankan pentingnya ibadah sebagai cara memerangi korupsi, tanpa menyadari bahwa pengamalan keagamaan yang salah justru bisa menyuburkan korupsi. Bisa dikatakan, akar terdalem dari tindakan korupsi adalah "dusta terhadap agama" dengan peribadatan yang keliru. Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini sebagai pangkal kecelakaan. "Maka celakalah orang-orang yang shalat; yang lalai dalam shalatnya; yang hanya pamer saja; yang tidak memberikan pertolongan" (QS 107: 4-7). Dalam Hikayat Florentin, Machiavelli menandai "kota korup" dengan sejumlah ciri. Antara lain, pemahaman keagamaan penduduk "berdasarkan kemalasan bukan kesalehan". Yang ia maksudkan adalah keagamaan yang menekankan aspek formal dan ritual ketimbang pengembangan esensi ajaran. Memuja "insan pembual daripada insan pekerja," memperindah tempat ibadah daripada menolong yang papa. Modus keagamaan seperti ini, menurutnya, "membuat orang tak lagi beramal saleh, yang mengantarkan penduduk menjadi mangsa empuk tirani politik dan modal."

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual

yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Amstrong dalam *The Great Transformation* (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas.

Mencuatnya isu agama dalam politik kontemporer mestinya tidak boleh sekadar alat mendulang suara, melainkan sebagai pembuka jalan ke arah persoalan yang lebih substantif: mempersoalkan basis spiritualitas kemajuan bangsa.

Dalam *A Study of History*, sejarawan terkemuka Inggris, Arnold Toynbee, melakukan pelacakan terhadap faktor kebangkitan dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban. Pada setiap kasus, Toynbee mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Singkat kata, bangunan negara (dan peradaban) tanpa landasan transenden, ibarat bangunan istana pasir.

Studi Toynbee tersebut mengisyaratkan adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kemajuan bangsa dan peradaban. Samuel Huntington, dalam *Who Are We?*, menunjukkan hal menarik mengenai keberlangsungan Amerika Serikat (AS) sebagai negara adikuasa, dibandingkan dengan Uni Soviet. Di AS, urainya, "Agama telah dan masih merupakan sesuatu yang sentral, dan barangkali identitas yang paling sentral bagi bangsa Amerika" (Huntington, 2004:20). Huntington juga menunjukkan (2006) bahwa geografi peradaban yang mampu bertahan adalah geografi peradaban yang berbasis keyakinan/ketuhanan. Dalam kaitan antara corak keagamaan dan politik, Alexis de Tocqueville (1835/1998) dan Robert Putnam (2006) mewakili para ahli yang

menunjukkan peran nilai-nilai keagamaan dalam mempengaruhi demokrasi.

Memang, ada faktor budaya yang dipengaruhi oleh agama yang menjadi rintangan bagi kemajuan. Akan tetapi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa faktor keyakinan memberikan kontribusi yang penting dalam proses demokrasi karena ia mempengaruhi aspek-aspek demokrasi itu sendiri. Tentu saja, banyak faktor yang ikut mempengaruhinya, sehingga dalam konteks mana agama menjadi rintangan dan dalam konteks mana pula ia menjadi pendorong kemajuan, merupakan hal yang harus dipertimbangkan.

Dalam kaitan itu, hendaklah disadari bahwa agama sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan yang suci (sacred) sedari awal memang mengandung kekuatan yang ambivalen: menakjubkan (enrapture) dan menghancurkan (annihilate). Kata "sacred" (Latin, sacer) itu sendiri bisa berarti karunia atau kutukan, suci atau cercaan.

Modus beragama yang berhenti sebagai pemujaan eksterioritas formalisme peribadatan, tanpa kesanggupan menggali interioritas nilai spiritualitas dan moralitas hanyalah berselancar di permukaan gelombang bahaya. Tanpa menyelam di kedalaman pengalaman spiritual, keberagamaan menjadi mandul, kering dan keras; tak memiliki sensitivitas-kontemplatif, conscious-intimacy, daya-daya kuratif serta hubungan-hubungan transformatif dengan yang suci dan yang profan. Tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan apa yang disebut penyair John Keats sebagai *negative capability*, yakni kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri dan keraguan dalam hidup. Tanpa menghikmatikan misteri, manusia memaksakan absolutisme sebagai respons ketakutan atas kompleksitas kehidupan dunia, yang menimbulkan penghancuran ke dalam dan ancaman keluar.

Banyak penyeru menekankan pentingnya ibadah sebagai cara

memerangi korupsi, tanpa menyadari bahwa pengamalan keagamaan yang salah justru bisa menyuburkan korupsi. Bisa dikatakan, akar terdalam dari tindakan korupsi adalah "dusta terhadap agama" dengan peribadatan yang keliru. Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini sebagai pangkal kecelakaan. "Maka celakalah orang-orang yang shalat; yang lalai dalam shalatnya; yang hanya pamer saja; yang tidak memberikan pertolongan" (QS 107: 4-7). Dalam Hikayat Florentin, Machiavelli menandai "kota korup" dengan sejumlah ciri. Antara lain, pemahaman keagamaan penduduk "berdasarkan kemalasan bukan kesalehan". Yang ia maksudkan adalah keagamaan yang menekankan aspek formal dan ritual ketimbang pengembangan esensi ajaran. Memuja "insan pembual daripada insan pekerja," memperindah tempat ibadah daripada menolong yang papa. Modus keagamaan seperti ini, menurutnya, "membuat orang tak lagi beramal saleh, yang mengantarkan penduduk menjadi mangsa empuk tirani politik dan modal."

Pemulihan krisis kehilangan basis kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang dan perawatan (khalifah) justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi institusional, tetapi juga membutuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih. Dalam proses transformasi ini, seperti ditekankan oleh Karen Amstrong dalam *The Great Transformation* (2006), persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, melainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak perlu meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas pada jantung kehidupan spiritualitas. ▫



**LENSA AKTUAL**

## **Tol Pejagan Pemalang Tanpa Penerangan**

Kendaraan pemudik melintas di exit Tol Pejagan-Pemalang, Banjar Anyar, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (11/7) malam. Satuan Lalu Lintas Polres Brebes mengimbau pemudik untuk berhati-hati dengan kecepatan maksimal 40 km/jam karena Tol Pejagan-Pemalang berdebu dan tanpa penerangan lampu jalan.

Antara - Oky Lukmansyah



# Mesin Mematikan Hercules Tua

**T**eka-teki penyebab jatuhnya pesawat Hercules C-130 A-1310 di Medan, Sabtu (30/6) dua pekan lalu akhirnya terjawab. Hasil penyelidikan TNI AU menyatakan matinya salah satu mesin pada pesawat menjadi penyebabnya.

Antena radio yang selama ini disampaikan benar adanya. Akan tetapi semua itu merupakan usaha pilot mengendalikan pesawat setelah salah satu mesinnya mati. Pilot Hercules, Kapten Sandy Permana, memutuskan untuk kembali ke Lapangan Udara Suwondo.

Nahas, karena salah satu mesin mati, pesawat kemudian terbang rendah dan menabrak antena radio yang tingginya mencapai 150 kaki.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna dalam pernyataannya disela-sela acara buka bersama di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (7/7), mengungkapkan, semua usaha penyelamatan sudah dilakukan Kapten Sandy selaku pilot Hercules.

"Hasil investigasi sementara *engine* nomor 4 mati kan. Kalau mati *action* pilot berarti ambil kecepatan. Nah dia kan sudah terbang rendah, ternyata di situ ada antena yang tingginya lebih dari 105 *feet*. Akhirnya dia lari ke kanan tabrak kubah, lalu nabrak ruko itu," ucapnya.

Hasil investigasi sementara ini mempertegas berbagai penilaian yang berkembang di masyarakat. Terlebih sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI AU (Kapuspenau) Marsma Dwi Badarmanto sempat menyatakan dugaan awalnya jatuhnya Hercules karena antena radio.

Tim investigasi disampaikan Dwi menemukan tiga alasan. Pertama, terkait permintaan Pilot Kapten Sandy Permana untuk *return to base* (Lanud Suwondo). Dari permintaan itu diduga Kapten Sandy sudah

mengetahui adanya kerusakan pada mesin pesawat.

Kedua, adanya laporan dari warga setempat yang melihat Hercules terbang miring. Seperti halnya temuan pertama, alasan kedua ini diduga karena matinya salah satu mesin pesawat. Temuan ketiga adanya antena radio di sekitar lokasi kejadian jatuhnya pesawat.

Secara teori, Hercules masih bisa melakukan *recovery* meski salah satu dari empat mesin yang ada mati. Kejadian seperti ini pernah dialami beberapa pesawat. Nah, untuk Hercules, karena terlanjur menabrak antena radio, manuver yang dilakukan Pilot Kapten Sandy mengalami kendala.

Penyelidikan terhadap musibah jatuhnya Hercules di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara (Sumut), dilakukan oleh prajurit TNI AU. Mereka terlatih dan memiliki keahlian dibidang penyelidikan kecelakaan pesawat. Hasil investigasi sejatinya tidak wajib mengumumkan hasilnya ke publik.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara AKBP Helfi Assegaf di RSUP Haji Adam Malik, Medan, dikutip dari Antara, mengatakan, jumlah korban jatuhnya pesawat Hercules yang sudah berhasil diidentifikasi mencapai 114 jenazah dari 146 kantong jenazah. Masih ada 32 jenazah yang belum berhasil diidentifikasi Tim DVI Polda Sumut.

## Pesawat Tua

Hasil sementara tim penyidik TNI AU ini sebelumnya sudah diperkirakan Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Mantan Sekretaris Militer Presiden itu menyatakan penyebab umum kecelakaan pesawat militer selama ini adalah masalah mesin. Perawatan mesin dan uzurnya usia Hercules menjadi titik fokusnya.





Petugas gabungan TNI dan Polri melakukan evakuasi pesawat Hercules C-130, kembali dilanjutkan di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7).

"Hasil-hasil penyelidikan kecelakaan pesawat militer selama ini menunjukkan, penyebabnya adalah mesin," jelasnya, Selasa (30/6) dua pekan lalu.

Diungkapkan, pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Medan, Sumatera Utara, merupakan pesawat yang diproduksi dan diterima di Indonesia sekitar tahun 1960-an dari Lockheed Martin di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Pesawat bertipe jelajah *short* ini sudah uzur apalagi sudah beberapa kali berganti mesin di Singapura.

Pesawat militer yang dimiliki TNI AU, dalam catatannya hanya 14 dari 24 pesawat yang layak terbang dan dioperasikan. Salah satu dari 14 pesawat layak terbang dan operasi itu adalah Hercules C-130 yang jatuh di Medan.

Ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi seluruh kebijakan tentang alat utama sistem pertahanan, termasuk pesawat-pesawat TNI AU. Ia menyarankan demikian sebab sejak tahun 2009 tercatat sudah tujuh kali pesawat militer mengalami kecelakaan.

"Harus dievaluasi sungguh-sungguh. Diperiksa semua pesawat. Kalau yang tidak layak terbang, dalam keadaan damai dan bukan situasi perang, pesawat itu tidak boleh terbang. Karena ini menyangkut keselamatan dan keamanan prajurit TNI, maupun keselamatan dan keamanan masyarakat umum," katanya.

Ke depan, dari hasil evaluasi itu bisa dipertimbangkan untuk membeli pesawat baru daripada menerima hibah dari negara lain. Toh, dari hibah itu ternyata embel-embelnya jauh lebih besar sehingga harganya tetap mahal.

Menurutnya alutsista baru dengan kapasitas baik akan jauh lebih bermanfaat meski hanya mampu dibeli dalam jumlah sedikit. Menyesuaikan anggaran yang ada, pembelian dalam jumlah lebih sedikit namun manfaatnya besar akan lebih baik.

"Mau seperti apapun, pesawat daur ulang itu *prime*-nya bisa mengalami keretakan. Jadi ini sudah uzur dan harus diganti," tandas TB yang juga politisi PDI Perjuangan. © Sumitro, Nailin In Saroh



## Kunjungi Mary Jane, Pac Man Dapat Keris dan Akik

Petinjau dunia asal Filipina Manny 'Pac Man' Pacquiao menemui Pimpinan DPR, Jumat (10/7). Pertemuan menyinggung penundaan eksekusi mati terhadap warga Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.

Sebelum itu, Pac Man yang datang ke Indonesia untuk keperluan syuting minuman berenergi secara khusus menemui Mary Jane di Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Ia berharap Indonesia benar-benar membatalkan eksekusi Mary Jane menyusul terbukanya kasus perdagangan orang di Pengadilan Filipina.

Jaksa Agung HM Prasetyo menekankan kunjungan Pac Man tidak akan mempengaruhi proses hukum yang kini tengah berjalan. Dimana pemerintah menunggu proses hukum *human trafficking* dimaksud.

"Berubah mungkin ya kalau memang ada *novum*, tapi kalau untuk menghilangkan, membuat Mary Jane bebas saya rasa tidak. Kita akan lakukan upaya hukum kalau sampai bebas," kata Prasetyo.

Di Gedung DPR, usai pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Pac Man diberi cinderamata berupa batu akik jenis Suliki dan keris. Akik berwarna kecoklatan itu langsung dikenakan ke jari manis Pac Man

Pac Man didampingi istri dan Duta Besar Filipina untuk Indonesia Maria Lumen V Sletta, Deputi Duta Besar Filipina, Manajer Manny, 2 pengacara Mary Jane, serta Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Dwi Prasetyo Santoso. /Nailin In Saroh-Sumitro-Ant



## Diduga Laporan Keuangan Bermasalah, Ahok Berang

Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan melalui rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7). Secara keseluruhan, 70 temuan itu jumlahnya mencapai Rp 2,16 triliun.

Dengan rincian, temuan program terindikasi menimbulkan kerugian daerah Rp 442 miliar, program berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta dan pemborosan Rp 3,04 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI 2014 (LKPD) itu, Pemda DKI mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berang. Ia menilai BPK tendensius dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Terlebih BPK tidak memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan kepada Pemprov DKI.

"Pernah enggak (di) seluruh Indonesia, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pada Gubernur di paripurna? Coba kamu cek, tahun lalu, BPK kasih ke saya, kenapa sekarang tidak," Ahok di Balai Kota, Jumat (10/7).

Ia menyebut BPK tidak pernah melakukan konsultasi sebelum melakukan audit dan menjadikannya sebagai buku LHP. Atas dasar itu, Ahok menyatakan siap buka-bukaan terkait LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemda DKI 2014.

"Ingat, anda (BPK) bukan Badan Pemeriksa dan Pencari Kesalahan lho. Anda Badan Pemeriksa Keuangan," tandasnya. /Ivan Setyadi-H Vidia Wirawan-Sumitro



## Pemerintah Tambah Utang, Kata Jokowi Membawa Manfaat



Guna merealisasikan program pemerintahan, khususnya pembangunan infrastruktur dalam negeri, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah utang luar negeri (ULN). Tambahan dana asing ini ditekankan pemerintah tidak akan membebani negara dari utang luar negeri.

"Kita hitung keuntungan dan manfaat untuk pendanaan ini jauh dari bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," kata Jokowi dalam acara silaturahmi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (9/6).

Penambahan utang ini berasal dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Singapura, Jerman dan Amerika Serikat. Peruntukannya bukan untuk konsumsi masyarakat ataupun untuk subsidi bahan bakar minyak.

Jokowi optimis utang luar negeri ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab salah satu hambatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur yang memadai.

"Infrastruktur jadi salah satu hambatan utama untuk mendorong mesin pertumbuhan baru. Distribusi logistik melalui laut paling murah sehingga pembangunan difokuskan pada laut," jelasnya.

Utang luar negeri Indonesia per April 2015 tercatat sebesar USD 299,84 miliar atau setara dengan Rp 4.003 triliun. Besaran utang ini naik dari bulan sebelumnya sebesar USD 298,06 miliar. Dilansir Bank Indonesia (BI),

utang luar negeri sebesar USD 299,84 miliar terdiri dari utang pemerintah bersama BI dan swasta.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mencatat 8 bulan pemerintahan Jokowi-JK telah menghasilkan utang luar negeri yang fantastis yaitu Rp 850 triliun. Jika dirata-rata per bulan, pemerintahan Jokowi utang uang Rp 106,25 triliun.

Tercatat utang dari Cina sebesar Rp 650 triliun, Bank Dunia RpRp 143 triliun, dan Islamic Development Bank (IDB) Rp 66 triliun.

"Sungguh ironis kalau seorang Presiden hobinya pinjam hutang, pantas saja ketika debat Pilpres 2014 yang lalu Jokowi dengan enteng mengatakan uang 40 triliun mudah dicari padahal kondisi ekonomi kita belum pasti, ternyata mudahnya itu dengan cara berhutang," kata Nurjaman, Rabu (8/7).

Ia mempertanyakan pemerintahan Jokowi yang sangat bergantung kepada hutang. Di sisi lain, penyerapan APBN sangat rendah. Nurjaman khawatir pemerintahan Jokowi yang jika dibiarkan memerintah 5 tahun akan membawa Indonesia kepada kebangkrutan.

"Jika tahun pertama Jokowi memimpin hutang Indonesia bertambah Rp 850 triliun, maka dalam lima tahun memerintah hutang kita akan bertambah Rp. 4.250 triliun. Lantas ke mana larinya APBN dan kekayaan Indonesia? Apakah ditelan bumi begitu saja?," tutupnya. /Sumitro-Ant

## PT TUN Sahkan Keputusan Golkar Agung dan PPP Romi

Banding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menang. Majelis Hakim PT TUN menganulir putusan PTUN sebelumnya yang membatalkan SK Menkumham.

Surat Keputusan (SK) Menkumham dimaksud terkait Keputusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putusan PTUN tersebut dilansir web resmi PT TUN Jakarta, Jumat (10/7).

Amar putusan Keputusan Partai Golkar yang di SK-kan Menkumham dibacakan Ketua Majelis Hakim PT TUN Arif Nurdu'a, sedangkan amar putusan Keputusan PPP dibacakan Ketua Majelis Hakim PT TUN Didik Andy Prastowo.

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis Hakim PTUN bernomor 217/G/2014/PTUN-JKT," demikian bunyi putusan tersebut sebagaimana dikutip Aktual.

Dengan adanya dua putusan banding, PT TUN mengabsahkan Keputusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono dan PPP dibawah kepemimpinan M Romahurmuziy sebagaimana di SK-kan Menkumham. /Muhammad Zaky Kusumo-Sumitro



**P**enjaga marwah konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi (MK), menganulir pasal yang mengatur larangan keluarga petahana mengikuti hajat demokrasi lima tahunan (Pilkada) di daerah. Pasal yang mengatur larangan tersebut digarisir Pasal 7 huruf r Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Pasal 7 huruf r UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya putusan ini, setiap warga negara berhak mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Bunyi Pasal 7 huruf r itu adalah 'Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut; tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan'.

Adapun ketentuan Pasal 7 berbunyi 'Yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan adalah antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan'.

"Ketentuan a quo nyata-nyata memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang," ucap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 33/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (8/7).

Meski dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan adanya pembatasan terhadap warga negara yang hendak



## Kekalnya Politik Dinasti

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun pembatasan tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Mahkamah memahami kekhawatiran terjadinya politik dinasti di berbagai daerah. Sebab akan muncul konflik kepentingan, sementara hajat demokrasi mesti berjalan *fair* antara calon dari keluarga petahana maupun calon lain.

Frasa 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana' sebagaimana diatur Pasal 7 huruf r UU Pilkada, menurut Mahkamah akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Pemaknaannya bisa ditafsirkan setiap orang sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Mahkamah, seharusnya pembatasan ditujukan kepada kepala daerah petahana, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu. Sebab dari petahana itulah kemungkinan penyalahgunaannya melekat.

Uji materi UU Pilkada diajukan anggota DPRD Kabupaten Gowa, Adnan Purichta Ichsan. Adnan merupakan anak Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, yang pada Pilkada Serentak 2015 mencalonkan

diri sebagai Bupati Gowa.

### Awasi Ketat Petahana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Sebab KPU sebelumnya telah menerbitkan Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan berikut Surat Edaran Nomor 302/VI/KPU/2015 tentang kepala daerah yang mengundurkan diri sudah bukan petahana.

"Terpaksa KPU harus membuat PKPU yang baru. Soal petahana dan garis kerabatnya, kemarin kan dilarang jadi sekarang dibukalah," ucapnya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

SE 302 sebelumnya menuai kritik dari kelompok pemerhati Pemilu. Pasalnya SE tersebut secara tidak langsung membuka keran politik dinasti di berbagai daerah. Dimana paska terbitkan SE 302, beberapa kepala daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali dan atau

*Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kedua kanan) mengikuti rapat koordinasi antara Bawaslu, DPR dan Kemendagri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).*

mendukung anggota keluarganya.

Tercatat Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang. Mereka telah mundur dari jabatannya untuk memuluskan langkah pencalonan anggota keluarganya.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan ada 22 petahana yang siap mengundurkan diri dengan adanya SE 302. Sebab dengan mengundurkan diri, mereka tidak lagi disebut sebagai petahana sehingga bisa memuluskan pencalonan anggota keluarganya.

Ditengah sorotan publik demikian, arah angin berpihak ke Imam Bonjol, Kantor KPU. Yasonna meminta semua pihak menghormati putusan MK yang mengembalikan hak setiap warga negara dalam proses demokrasi.

“Kita tidak boleh protes, apa boleh buat. Walau pun waktu itu saya ikut di dalamnya sudah kita pertimbangkan dari segala aspek. Ok deh itu hak asasi manusia, MK memang *the guardian of the constitution*,” sebut politisi PDI Perjuangan itu.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga meminta KPU segera merevisi PKPU Pencilonan. Menurutnya, putusan MK yang menganulir larangan politik dinasti harus diterima semua pihak.

“Kami minta pada KPU untuk diatur dalam peraturan KPU. Cukup begitu saja. Itu teknis saja. Tidak perlu harus merevisi UU karena akan melebar tapi cukup ditegaskan dasar keputusan MK bisa diatur dalam PKPU,” kata dia, Rabu (8/7).

Tjahjo mengakui konflik kepentingan petahana multitafsir dan bisa diartikan secara relatif. Setiap orang bisa mengartikan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu dengan adanya putusan MK, setidaknya memberikan penegasan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

Apa yang telah diputuskan MK



Yasonna Laoly

sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah akan mematuhi.

“Dulu ada kemauan masyarakat ditampung oleh parpol, oleh DPR, pemerintah juga UU, lalu masyarakat gugat kembali dan diserahkan ke MK. MK lalu memutuskan. Ini upaya hukum yang harus kami hormati,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak sehubungan dengan adanya putusan MK. Pengawasan termasuk menyangkut penggunaan fasilitas negara dalam proses Pilkada.

Pihaknya khawatir nantinya fasilitas negara dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Terlebih belakangan sudah ada gelagat demikian.

“Jadi sudah ada langkah-langkah ke arah sana, bagaimana keluarga petahana tidak diberi fasilitas lebih dan tidak boleh menggunakan fasilitas apapun dari jabatan petahana itu sendiri,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

KPU sendiri memastikan akan segera melakukan perubahan PKPU Pencilonan. Sebab dengan makin



Tjahjo Kumolo

dekatnya pelaksanaan Pilkada, aturan teknis dan syarat pendaftaran itu mendesak difinalkan dengan rujukan putusan MK.

“Jika ada keputusan MK yang berbeda dari undang-undang, tentu kami pakai yang diputus oleh yang menjadi bagian dari putusan MK itu sendiri, termasuk tentang petahana sendiri. Yang kami ikuti putusan MK itu,” ujar Husni.

Ditambahkan Komisioner KPU, Ida Budhiati, KPU akan mempelajari putusan MK secepatnya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan merevisi PKPU Pencilonan. Diharapkan nantinya tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh petahana, sebab itu perlu diatur secara ketat aspek penegakan hukumnya.

Bagaimana kemudian apabila dalam pelaksanaannya petahana terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan atau minimal ada bukti permulaan yang cukup. Petahan misalnya bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum.

Bahkan, untuk kasus itu, petahana bisa diseret ke meja hijau karena melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Dengan kata lain, tidak cukup pertanggungjawaban hukumnya semata pidana pemilihan. 

## Jend. TNI Gatot Nurmantyo Dan Letjen (Purn) Sutiyoso Sebagai Panglima TNI dan Kepala BIN



Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Letjen (Purn) Sutiyoso akhirnya sah menjabat sebagai Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru, setelah keduanya resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (8/7).

Sebelumnya Gatot menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 TNI Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Sedangkan Sutiyoso sendiri dilantik berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN.

Jenderal Gatot menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun per 1 Agustus 2015. Sementara Sutiyoso menggantikan Letjen (Purn) Marciano Norman. /Deddy K

### Salah Ketik di Undangan Pelantikan Kepala BIN

Ada yang menarik, yang kemudian menjadi perbincangan saat persiapan pelantikan kepala BIN yang baru, Letjen (Purn) Sutiyoso di Istana Negara.

Sebelumnya diberitakan jika pihak Istana telah keliru dalam menulis surat undangan pelantikan kepala BIN. Dalam undangan yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara tersebut, tertulis 'Pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional'. Padahal, BIN sendiri adalah singkatan dari Badan Intelijen Negara.

Terkait dengan hal tersebut, politikus Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, menteri sebaiknya tidak 'merepotkan' Presiden Jokowi, termasuk sekadar untuk urusan administratif terkait surat-menyurat. Palsunya lanjut Fadel dengan demikian, publik merasa prihatin kepada Presiden.

Apalagi, bukan kali pertama ini saja, para pembantu presiden membuat kisruh, alih-alih demi peningkatan kinerja sesuai bidang masing-masing. "Ya kasihan!" cetus Fadel Muhammad, Rabu (8/7). /Deddy K

### KPU Akan Merevisi PKPU No 9/2015

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan pihaknya akan merevisi Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari putusan MK yang melegalkan politik dinasti.

"Kita menghormati putusan MK, kita akan tindak lanjuti putusan MK, kita akan revisi PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) Nomor 9 Tahun 2015 terkait pasal 4," jelas Ferry di Jakarta, Jumat (10/7).

Seperti diketahui Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sendiri mengatur tentang pembatasan pencalonan agar tidak ada konflik kepentingan dengan petahana.

Dengan demikian, calon yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan petahana tidak bisa mencalonkan diri untuk bertarung di Pilkada, hal bertujuan untuk mencegah terjadinya politik dinasti.

Tetapi, MK akhirnya membolehkan siapa saja mencalonkan diri dalam pilkada. Palsunya, MK menilai pembatasan terhadap calon yang memiliki hubungan dengan petahana adalah diskriminatif.



Ferry berharap dengan perubahan PKPU, proses pengawasan dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada calon yang nantinya memanfaatkan faktor petanaha untuk dapat memenangkan Pilkada.

Sebelumnya diberitakan MK telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU Pilkada. MK beranggapan melarang keluarga dan kerabat petahana untuk maju dalam bursa pencalonan kepala daerah melanggar konstitusi dan bersifat diskriminatif. UU ini sendiri diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan. /Deddy K

## PPP Romy Gembleng 108 Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu M Romahurmuziy memastikan akan mengirimkan kadernya berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015. Partai sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan berikut konsolidasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Sudah ada 108 bakal calon kepala daerah yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan," terang Ketua DPP kubu Romahurmuziy, Rusli Effendy, di kantor sementara DPP PPP, Jakarta Selatan, Minggu (12/7).

Dari jumlah tersebut, tambah Sekjen Aunur Rofiq, tercatat ada 45 bakal calon berstatus petahana. Mereka tidak ada keraguan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan jauh sebelum adanya keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

PPP kubu Romy percaya bisa mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2015 atas dasar putusan PT TUN. Dimana dalam keputusannya, majelis hakim memperkuat SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada Serentak, dinyatakan bahwa partai politik yang berhak mengajukan kadernya sebagai calon kepala daerah adalah yang memiliki SK Menkumham. /Novrizal Sikumbang-Sumitro-Ant



## Raja Dangdut Akhirnya Buat Partai Baru



Musisi dangdut Rhoma Irama mendeklarasikan Partai Islam Damai Aman (Idaman) dengan melakukan peresmian logo partai sekaligus penandatanganan akte pendirian di Jakarta, Sabtu (11/7).

Partai Idaman didirikan dengan kesadaran memberikan kontribusi konkret pada pembangunan bangsa yang pancasilais dalam berbagai aspek, kata Rhoma yang memegang jabatan sebagai Ketua Umum Partai Idaman.

"Partai Idaman tidak menjadi partai yang eksklusif, tapi inklusif. Partai bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan bahkan untuk mereka yang nonmuslim," katanya.

Kepengurusan Partai Idaman untuk saat ini hanya terdiri dari Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekretaris

Jenderal Abdurrahman Tarjo.

Rencana jangka pendek partai tersebut adalah mengajukan nota pendirian partai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Jika disetujui, maka Partai Idaman akan dideklarasikan secara formal dan nasional oleh para pengurus pada 17 Agustus 2015.

Partai Idaman menargetkan dalam waktu dekat untuk memiliki kader sebanyak 5.000 anggota per kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Abdurrahman Tarjo yang berprofesi sebagai advokat dan dulu sempat tergabung sebagai pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), berharap partainya pada 2019 dapat menjadi salah satu peserta pemilu.

Partai Idaman memakai simbol segi lima yang berarti rukun Islam dengan warna dasar merah dan putih yang menunjukkan warna dari bendera Indonesia. "Di dalam simbol segi lima, terdapat simbol hati yang berarti 'love' Indonesia. Indonesia yang populis dan universal," kata Rhoma Irama. /Novrizal Sikumbang

## Kanal 'Lapor Presiden', Penyambung Lidah Rakyat ke Jokowi

"Selamat Datang di Lapor Presiden, di mana Anda sebagai rakyat dari seluruh Indonesia dapat mengajukan laporan seputar masalah dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden dan menerima tanggapan dari anggota masyarakat lainnya".

Demikian kata pembuka kanal [www.laporpresiden.org](http://www.laporpresiden.org) ketika membuka situs yang diumumkan Presiden Joko Widodo melalui akun Facebook dan Twitter pribadinya.

Kanal tersebut secara khusus dibuka Jokowi untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus sebagai masukan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

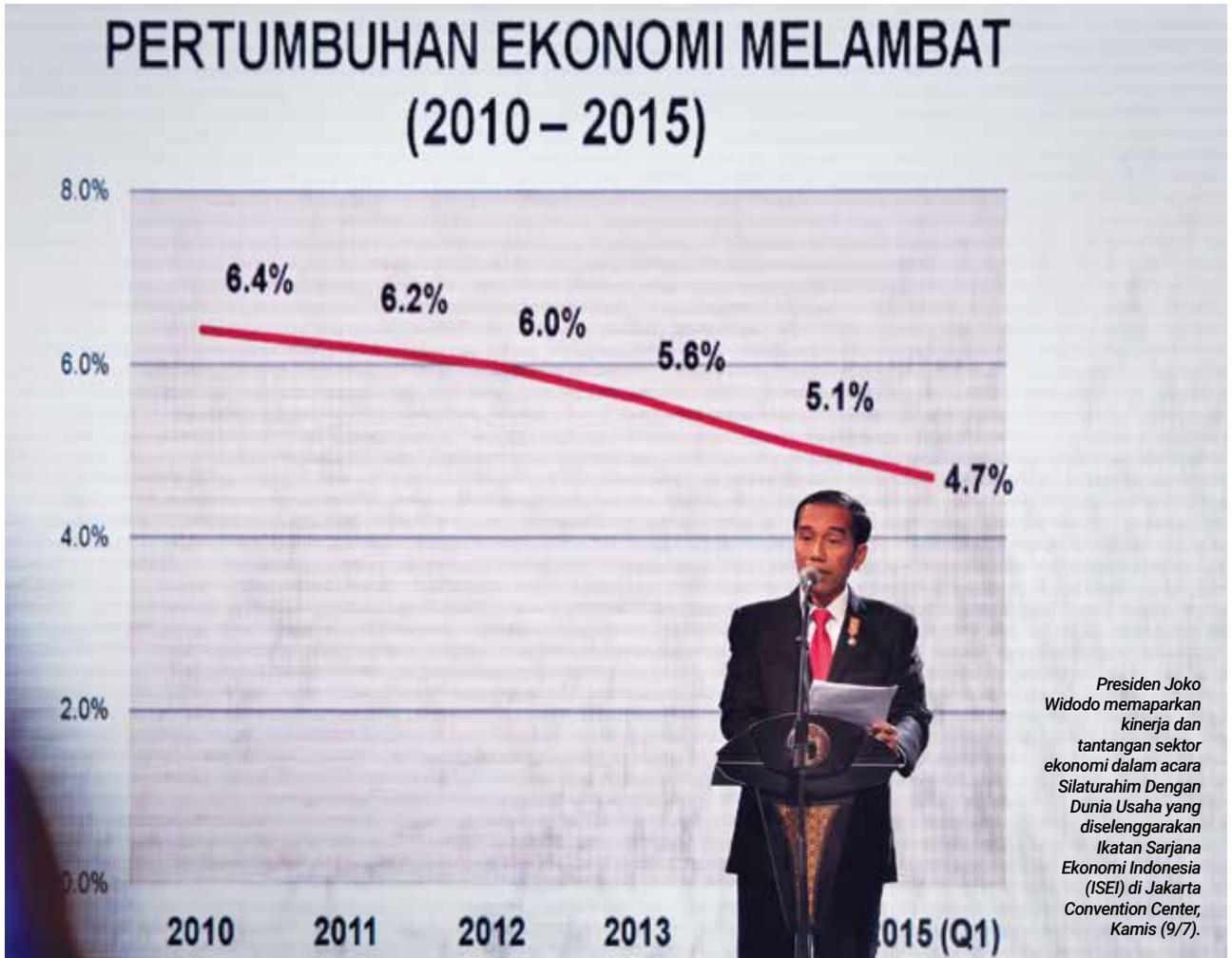
"Saudara-saudara, saya percaya masukan langsung saudara-saudara bermanfaat untuk membuat keadaan

menjadi lebih baik," kata Jokowi dikutip Aktual dari Facebook 'Presiden Joko Widodo', Minggu (12/7).

Kanal saluran komunikasi langsung yang diumumkannya itu merupakan hasil karya anak bangsa. Jokowi berharap ke depan akan menerima banyak masukan dari masyarakat.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi masukan yang disampaikan anggota masyarakat lainnya dalam kanal tersebut. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia terus bekerja mengawal proses pembangunan.

"Setiap bulan saya akan menerima rangkuman laporan untuk bahan masukan saya menentukan solusi serta melahirkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat," kata Jokowi. /Soemitro



# Bongkar Kabinet Hadapi **Krisis**

**P**emerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi –JK) telah melewati waktu enam bulan dalam menakhodai negeri ini tanpa hasil yang menggembirakan. Alih-alih berprestasi, kebijakan yang diambil justru kontra-produktif dengan janji-janji pro rakyat yang didengungkan semasa kampanye pilpres.

Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya menjalankan roda pemerintahan tanpa konsep yang

jelas. Ini terbukti dengan lahirnya banyak kebijakan penting yang kerap berubah-ubah dan ujung-ujungnya terjadi aksi saling menyalahkan sesama pembantu presiden.

Lemahnya kinerja tim ekonomi pemerintah Jokowi-JK menjadi pusingan kisruh yang mendekati titik didih. Pakar Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyebut perekonomian Indonesia sudah lampu kuning bahkan masuk ke ambang resesi. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah lampu kuning resesi yang

menjurus pelambatan total, meski belum sampai pertumbuhan negatif seperti tahun 1997 dan 1998,” ungkap Noorsy.

Perekonomian Indonesia memang berada pada lampu kuning. Indikatornya antara lain nilai tukar rupiah yang terus merosot yang bukan tidak mungkin akan menembus angka Rp14.000 per dollar AS. Kemudian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 bakal terhempas, bahkan bias dikisaran 4,5 persen alias jauh dari asumsi APBNP 2015 sebesar 5,7% dan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,4 persen.

Belakangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyampaikan revisi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2015 menjadi

5,2%. Revisi ini dilakukan dengan melihat berbagai kondisi mutakhir yang terjadi di tanah air. "IMF setiap triwulan juga merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dan negara di Dunia. Wajar kalau kami merevisi karena kami memang mencari posisi paling realistis untuk bisa dicapai," ucap Bambang.

Revisi target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah ini memakai asumsi kisaran belanja modal paling tinggi 87%-90%. Karena belanja pemerintah yang paling tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Bambang bahkan mengaku tidak ada

harapan apa-apa dari perdagangan ekspor, sedangkan sektor investasi masih ada optimisme meski harus segera dibuktikan.

Rapuhnya kondisi perekonomian nasional menunjukkan bahwa kinerja tim ekonomi pemerintah memang sangat lemah. Lebih mengesankan lagi, pemerintah juga tidak punya konsep jelas dalam menopang ekonomi mikro berbasis ekonomi kerakyatan. Daya beli masyarakat sudah dihancurkan sejak awal dengan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menaikkan tarif dasar listrik sehingga kantong rakyat semakin terkuras untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari.

Masyarakat semakin miris melihat kinerja pemerintahan yang berjalan seperti siput. Penyerapan anggaran pemerintah hingga triwulan II-2015 hanya mencapai 18 persen. Inilah indikator bahwa pemerintahan belum bekerja dengan baik sehingga terjadi stagnasi pembangunan.

Rendahnya penyerapan anggaran diantaranya akibat lambatnya konsolidasi kementerian saat terjadi perubahan nomenklatur. Ego sektoral antar kementerian kerap muncul. Kementerian Kehutanan kini ditambah dengan fungsi Lingkungan Hidup. Beban dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum ditambah urusan perumahan rakyat. Kementerian Riset dan Teknologi diberi beban pendidikan tinggi. Ada pula Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang baru dibentuk butuh waktu dalam mengambil peran Kementerian PU dalam mengurus masalah tata ruang.

"Ada 10 kementerian dan lembaga yang nomenklaturnya perlu disesuaikan, sehingga pengeluaran pemerintah masih terhambat," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

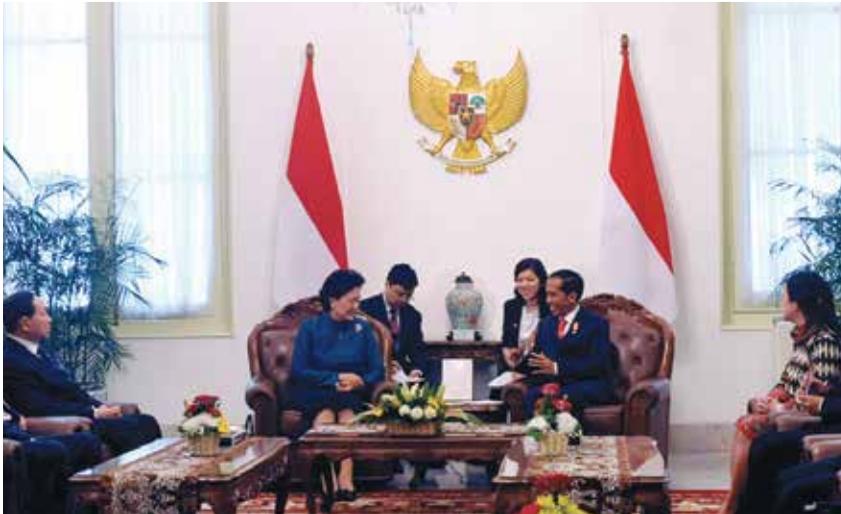
Bank Indonesia mengakui ada penurunan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun 2015. Hal ini terlihat dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Juni 2015 yang tercatat 122,4, turun 0,5 poin dari 122,9 pada bulan Mei.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara menyebut pelemahan IEK akibat penurunan indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja serta khawatir akan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang tidak menentu.

Buruknya kinerja ekonomi nasional menimbulkan aksi saling tuding sesama pembantu presiden,

*Menko Perekonomian Sofyan Djalil saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6).*





Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri RRT Liu Yandong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/5).

terutama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan tim ekonomi yang menyebut diri kaum professional dan dimotori Sofyan Djalil (Menko Perekonomian), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan), dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Aksi rebut-ribut sesama pendukung pemerintah ini membuktikan bahwa Indonesia krisis *Leadership*. Presiden Jokowi tampaknya kebingungan menyikapi kondisi ini.

Sofyan sebagai pimpinan tim ekonomi menjadi salah satu dari sejumlah menteri yang dinilai layak untuk diganti. Menanggapi kabar tersebut koordinator menteri yang dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini mengaku siap untuk diganti. "Kalau saya tak populer dan di-*reshuffle*, tak ada masalah" ujarnya pekan ini di Istana Negara.

Hal yang sama disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Terserah Presiden," ujarnya singkat.

Capaian tim ekonomi Kabinet Kerja memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Target yang dicanangkan dalam APBN 2015 tidak banyak tercapai. Bahkan semakin memburuk. Menurut catatan Aktual

pada bulan April Bambang sempat mengatakan defisit anggaran berkisar Rp77 Triliun. "Posisi defisit per 27 April 2015 adalah Rp77 triliun jadi sudah turun. Kenapa turun? Belanja tetap tumbuh tapi penerimaannya mulai bergerak naik bahkan untuk bea dan cukai dia sudah 'year on year'-nya sudah positif, penerimaan negara bukan pajak khususnya migas juga di atas estimasi, di atas perkiraan. Nah, jadi pajak juga sudah mulai menggeliat sehingga itu yang bisa menurunkan defisit pada posisi tanggal 27 april 2015 dan juga secara 'cash flow' (aliran kas) kondisinya aman tidak ada 'issue' (masalah)," katanya dalam konferensi pers Belanja Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4).

Kondisi keuangan negara makin memburuk sampai bulan Juli ini. Bambang mengatakan defisit anggaran telah mencapai lebih dari Rp200 triliun. Defisit anggaran pada akhir 2015 diproyeksikan mencapai 2,23 persen terhadap PDB, atau melebar dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 1,9 persen terhadap PDB. "Memang defisit akan melebar, tentunya ini 'worst case' kalau penerimaan perpajakan hanya 92 persen, tapi kita upayakan pajak tetap tinggi," katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7).

Menkeu menjelaskan dengan adanya tambahan defisit 2,23 persen terhadap PDB atau senilai Rp260 triliun, maka akan ada tambahan pembiayaan yang diupayakan dari pinjaman dari berbagai lembaga multilateral, bukan dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). "Perlu ada pembiayaan tambahan Rp38 triliun yang akan diupayakan dari pinjaman multilateral maupun bilateral, seperti World Bank, ADB, Jerman sama Jepang, bukan mencari dari pasar SUN, untuk menutup defisit anggaran," katanya.

Kekacauan dibidang ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan arah politik luar negeri ke Tiongkok. Sejak Oktober menyandang memegang kendali kekuasaan Jokowi dengan tegas menentukan arah ekonomi dengan membentuk poros Jakarta-Peking. Namun hingga kini realisasi investasi Tiongkok masih jauh dari target.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada bulan Juni Tiongkok merupakan negara dengan realisasi terendah di Indonesia. Deputy Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan umumnya, realisasi investasi dari komitmen izin prinsip hanya 40%-50%. Sementara Tiongkok hanya mampu merealisasikan investasi dalam rentan 7-10 %.

Saat ini, stok izin prinsip yang ada (2010-2015) senilai Rp 4.125 triliun. Untuk mengejar target realisasi investasi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2019 sebesar Rp 3.500 triliun, dibutuhkan izin prinsip senilai Rp 7.500 triliun. "Realisasi investasi itu kan hanya 45%-50%. Berarti kita hanya punya stok Rp 7.500 Triliun. Di stoknya harus ada tambahan Rp 3.000-3.500 triliun. Ada dua tugas, satu bagaimana menambah stok ini. Yang kedua, tentunya stok ini harus dikawal harus kita realisasi supaya bisa menjadi realisasi tadi," kata Lubis.

Melihat angka realisasi yang

rendah membuat Presiden Jokowi mulai mendesak Tiongkok. Pada hari Rabu 27 Mei lalu Jokowi meminta Tiongkok segera merealisasikan investasinya. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong. "Tadi membahas percepatan kerja sama Indonesia-Tiongkok, terutama sekali kaitannya dengan investasi. Jadi, misalnya, beberapa proyek itu harus segera dieksekusi. Presiden nggak mau hanya janji-janji saja atau *groundbreaking* saja, eksekusinya harus cepat," kata Menteri Sekretaris Negara Pratiko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/5).

Saat Indonesia menantikan realisasi investasi dari Tiongkok kondisi di Negeri Tirai Bambu itu justru tengah terpuruk. Rabu (8/7) bursa saham Tiongkok terjun bebas tak terkendali. Shanghai Composite Indeks hingga perdagangan siang hari waktu setempat anjlok lebih dari 8 persen, sedangkan Shenzhen Component turun hampir 5 persen.

The Guardian melaporkan dalam waktu sepuluh menit perdagangan, lebih dari 1.000 saham di dua bursa China tersebut anjlok rata-rata 10 persen dan secara otomatis perdagangannya dihentikan karena terkena *auto rejection*. Sementara itu, sekitar 1.400 perusahaan atau lebih dari setengah yang melantai di bursa meminta perdagangan sahamnya dihentikan guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan riset Bespoke Investment Group yang dikutip CNN, Rabu (8/7/2015), kapitalisasi pasar China sudah berkurang hingga USD 3,25 triliun (Rp 42.250 triliun) dalam satu bulan terakhir. Dana tersebut merupakan akumulasi dana yang ditarik keluar pasar modal sejak 12 Juni 2015 lalu, atau kurang dari sebulan lalu.

Nilainya yang sangat besar itu setara dengan total kapitalisasi pasar saham Prancis, atau sekitar 60% dari kapitalisasi pasar Jepang. Sementara dibandingkan kapitalisasi pasar modal Indonesia Rp 5.008 triliun

maka nilainya berkali-kali lipat lebih tinggi. Dana tersebut kebanyakan milik warga China, karena investor asing hanya punya sedikit porsi di bursa negeri tirai bambu yaitu 1,5% dari total kapitalisasi pasar modal, berdasarkan data Capital Economics.

Bank Central Tiongkok The People's Bank of China (PBOC) akan mengucurkan dana yang memadai menghadapi kondisi perekonomian yang terus bergolak. Bank sentral akan "membantu China Securities Finance Co. secara aktif untuk mendapatkan likuiditas yang memadai" melalui sejumlah saluran termasuk pinjaman dan obligasi, menurut pernyataan itu sebagaimana dikutip Bloomberg, Rabu (8/7/2015).

Kondisi perekonomian Tiongkok yang goyah menjadi perhatian serius Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Agus Martowardojo menegaskan pihaknya memonitor efeknya terhadap kondisi perekonomian Indonesia. "Kita harus antisipasi karena Tiongkok jadi pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia. Kalau koreksinya tajam itu bisa ada dampak dan harus diantisipasi karena ada risiko *interconnected* antara negara," kata Agus di Jakarta, Rabu malam.

Melemahnya bursa saham Tiongkok sebenarnya sudah terasa sejak 12 Juni tahun ini. Berdasarkan catatan bursa saham Tiongkok jatuh hingga 30% sejak Juni hingga kini. Gejolak saham itu juga memicu langkah lebih dari 500 emiten China untuk menghentikan penjualan sahamnya (suspend). Mereka ingin meminimalisasi risiko kerugian akibat volatilitas yang luar biasa tajam belakangan ini. Sementara itu, China Securities Finance Corp menyediakan 260 miliar yuan setara USD41,87 miliar untuk 21 pialang. Pinjaman itu diperuntukkan guna membeli saham untuk meredam gejolak.

Kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sebelumnya telah diungkapkan oleh politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)



Pramono Anung. Menurutnya tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tolak ukur akan terjadinya krisis. Mantan Sekjen PDI-P tersebut berpandangan saat ini pemerintah harus segera melakukan perombakan dalam tubuh kabinet. "Presiden harus memikirkan orang yang punya pengalaman mengantisipasi persoalan ekonomi ketika krisis, misalnya ketika krisis ekonomi 1998 atau 2008 dulu," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Juli 2015.

Siapakah sosok yang piawai dalam penanggulangan krisis. Tentu tidak susah menyebut nama Sri Mulyani dalam kategori ini dan mungkin Darmin Nasution. Namun Pram enggan menyebutkan nama. "Tak etis menyebutkan nama, karena semua tahu *reshuffle* adalah hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Jika benar perombakan tim ekonomi akan menjadi cara jitu mencegah krisis dengan masuknya Sri Mulyani cs belum tentu hal itu dapat meredam gejolak politik. Pasalnya saat ini partai pendukung pemerintah mendesak Jokowi untuk mengganti tim ekonomi dengan sosok dari kalangan politisi seperti yang dilontarkan oleh PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lantas mana yang akan dipilih Jokowi? Semua akan menjawab sesuai lebaran Idul Fitri. © Moh Sahlan

# Rini Sudah Siapa Pergi

**M**egawati Soekarnoputri menempuh jalan sabar dalam praktik berpolitiknya. Padahal, Ketua Umum PDI Perjuangan bukan sekali dua kali dikhianati dan ditusuk dari belakang oleh kawan maupun lawan politiknya. Semua dihadapi dengan sikap sabar. Kesabaran revolusioner ia menyebutnya.

Mega menyatakan demikian dalam pidato politik pada pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali, Kamis 9 April 2015. Saat itu, berkaca pada pengalamannya berpolitik, putri Bung Karno sempat mengingatkan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan adanya 'Penumpang Gelap' dalam pusaran kekuasaan.

Mereka, penumpang gelap, pandai dalam memainkan perannya. Berwajahkan kepentingan rakyat, lalu mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan begitu masuk dan terlibat di dalamnya. Secara spesifik, ia juga mengingatkan Jokowi untuk memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke depan. Yakni dengan menjadikannya sebagai pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari.

Kini, tiga bulan berselang setelah Mega mencurahkan *uneg-unegnya*, teka-teki siapa pihak yang dimaksud sebagai penumpang gelap belum ada titik terang. Hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap adanya menteri yang tidak loyal di Rumah Dinas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Minggu (28/6).

Si Menteri itu berani menghina

Presiden Jokowi. Hal yang tidak pantas dilakukan oleh pembantu terhadap atasannya. Hinaan yang terekam ini disampaikan Tjahjo dan sudah didengar langsung oleh Jokowi.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan mengaku sudah mengetahui siapa menteri yang tidak loyal terhadap Jokowi. Menteri tidak tahu terimakasih, kata Tjahjo. Meski begitu, ia enggan mengungkap identitas menteri dimaksud.

Ciri-ciri menteri penghina Jokowi kemudian dipertegas kader partai berlambang banteng moncong putih lainnya, Masinton Pasaribu. Menteri itu saat ini menangani bidang ekonomi, perempuan, tidak loyal, dari kalangan profesional dan bukan dari partai pendukung. Menteri itu kerap membuat kebijakan yang bertentangan dengan konsep Nawa Cita.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan mewanti-wanti Jokowi agar



Menteri BUMN Rini Soemarmo di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/6).

berhati-hati terhadap pembantu di sekelilingnya. Sebab, mereka bisa berbalik mengkhianati Jokowi berikut konsep yang akan dibangun dalam lima tahun ke depan.

“Sudah kami ingatkan, di sekeliling Presiden ada ‘brutus-brutus’ yang akan menikam dari belakang,” kata dia.

Selain menteri perempuan, sebenarnya ada dua pejabat lain yang turut menjelek-jelekkan Presiden. Satu pejabat saat ini juga

duduk di Kabinet Kerja dan satunya lagi menduduki jabatan setingkat menteri. Seakan memberikan jawaban atas teka-tekinya, Masinton memberikan *clue* dua pejabat dimaksud.

Pertama, menteri itu pernah melakukan inspeksi mendadak terkait proses *dwelling time* atau waktu tunggu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua adalah pejabat setingkat menteri yang keberadaannya di Istana Negara.

“Dan dia bicara sama, kurang lebih seperti itu. Bicara di dalam komunitasnya,” katanya dalam diskusi Forum Aktual bertajuk ‘Siapa Kena Reshuffle?’ di Jakarta Selatan, Minggu (5/7).

Mengenai waktu tunggu bongkar muat barang, Presiden Jokowi saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu 17 Juni 2015, memang marah besar. Pasalnya, dari waktu ke waktu, sejak dirinya memimpin negeri ini tidak ada perubahan di mendasar.



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasti Kristiyanto (kanan) di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (28/6).

Proses bongkar muat barang tetap saja memakan waktu yang lama.

Presiden menginginkan pelayanan di pelabuhan bisa berlangsung cepat agar roda perekonomian turut berjalan dengan baik. Sebab kelancaran distribusi barang turut menekan harga, termasuk menyangkut pembiayaan transportasi kapal. Di sisi lain, negara bisa mengalami kerugian hingga ratusan triliun karena lamanya proses *dwellling time* di pelabuhan.

"Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menteri yang saya copot," katanya saat memimpin rapat mendadak disela-sela sidang di Kantor Pelindo.

Bagaimana kata-kata penghinaan pembantu Presiden, politisi NasDem Akbar Faisal mengungkapkannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). Ia mendapatkan transkrip ucapan penghinaan kepada Jokowi melalui grup di ponsel pintar miliknya pada 2 Juni 2015.

"Kalau memang saya harus dicopot ya silahkan. Yang penting Presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. *Wong* Presiden juga enggak ngerti apa-apa," demikian bunyinya dibaca ulang Akbar.

Nama Menteri BUMN Rini Soemarno mencuat sebagai pihak dinilai tidak loyal kepada Presiden. Namun Rini segera membantah. "Coba ya kalau saya sebagai pembantu Presiden, ya tentunya saya menghormati Bapak Presiden," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Namun ia menyatakan siap jika Presiden tidak lagi membutuhkan tenaganya di Kabinet Kerja. "*Reshuffle* menteri silakan tanya ke Bapak Presiden. Saya sebagai pembantu

presiden, yang melakukan *assessment* seharusnya Bapak Presiden, jadi saya serahkan ke Presiden," ujar dia.

Sementara itu politisi PDI-P Pramono Anung membenarkan adanya menteri yang menghina Presiden. Bahkan ia menyebut penghinaan itu dilakukan dalam sebuah forum. Bukti rekaman penghinaan saat ini telah dikantongi oleh PDI-P. Rekaman berdurasi 15 menit itu tersebar di lingkup internal partai sekitar tiga minggu lalu. "Waktu itu, kami sepakat untuk diam saja," kata Pramono.

Pram mengatakan rekaman tersebut berisi pernyataan seorang menteri yang tampaknya sedang berbicara dalam komunitas terbatas. "Ia berbicara lepas sekali. Nadanya semacam sinis," ujarnya.

Tjahjo sendiri menampik menyebut Rini sebagai penghina Presiden. "Saya tidak pernah sebut nama siapapun dalam pernyataan atas pertanyaan teman-teman pers. Yang sebut nama Menteri Ibu Rini atau nama lain, siapa?" ujar Tjahjo, Selasa (30/6).

Meskipun publik dengan kasat mata dapat melihat ketidakharmonisan antara PDI-P dengan Rini Soemarno. Pemicunya tidak lain adalah retaknya hubungan antara Rini dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Perpecahan tersebut terjadi kurang dari 24 jam sebelum Rini dipilih menjadi Menteri oleh Jokowi. Sumber Majalah

Aktual menjebutkan saat itu Megawati tidak suka dengan cara Rini membentuk Tim Transisi. Mega yang berada di Amerika pasca Pilpres mendengar kabar tersebut dari Indonesia.

Setiba di Indonesia Megawati memanggil Rini di rumahnya Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mega menegur Rini yang dinilai telah melampaui kewenangannya. "Kamu memang dekat dengan saya. Tapi jangan semua temanmu kamu ajak masuk (Red-Kabinet), saya tidak suka," ujar sumber menirukan Megawati.

Bukannya melunak Rini malah berdiri dan meninggalkan rumah Mega. Sejak saat itulah segala upaya dilakukan oleh Megawati untuk menyingkirkan Rini. Politisi PDI-P di Senayan dengan keras menyoroti kinerja pemerintah layaknya partai oposisi bahkan lebih keras. Effendy Simbolon misalnya dengan terang menyebut Rini sebagai ganjalan dalam pemerintahan yang diusung partainya.

Belakangan Masington ikut bersuara. Ia bahkan menyebutkan ada tiga "Brutus" dalam kabinet Jokowi. Ketiganya adalah Rini, Menteri Sekretaris Kabinet Andi

Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

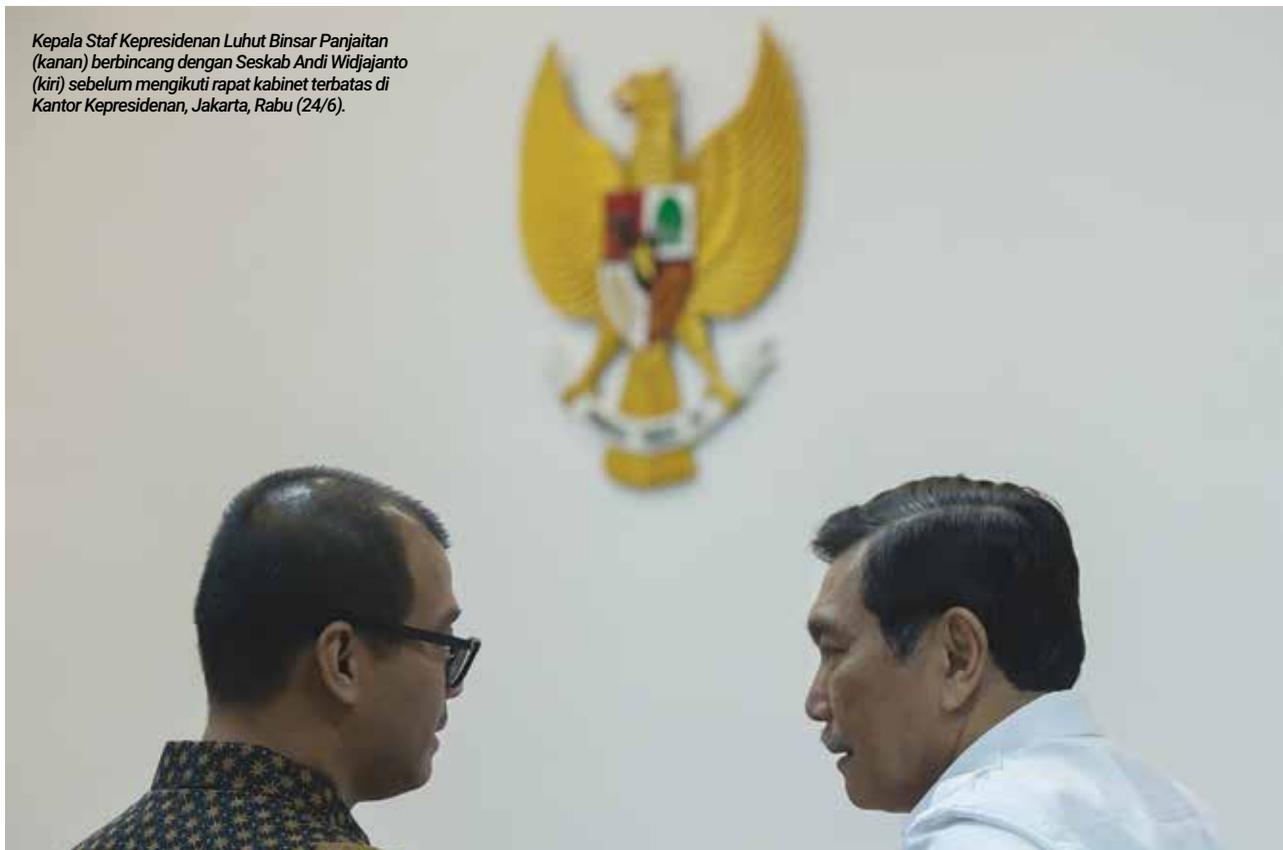
Menurutnya banyak catatan buruk dari kinerja ketiganya.

Masinton menyebutkan yang paling baru adalah



Masinton Pasaribu

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (kanan) berbincang dengan Sekkab Andi Widjajanto (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6).



kesalahan undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditulis oleh pihak istana dengan singkatan Badan Intelijen Nasional. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dua pejabat di lingkaran dalam Istana Negara tersebut, Mensesneg, dan Sekkab layak diganti," kata Masinton.

Sebelumnya banyak kesalahan yang dilakukan oleh lingkaran terdekat Presiden. Seperti saat salah menyebutkan data utang luar negeri. Kesalahan dalam pidato Presiden tentang menyebut tempat kelahiran Presiden Soekarno dan banyak lagi catatan keteledoran yang dilakukan sepanjang 8 bulan menjabat ini.

Informasi yang dihimpun Aktual menyebutkan PDI-P telah melayangkan surat kepada Presiden untuk mengganti sejumlah nama. Namun yang paling disasar ada dua nama. "Rini dan Andi sudah kita minta untuk diganti. Tinggal tunggu bagaimana Presiden. Kalau tidak patuh akan ada tindakan politik," ujar

politisi PDI-P yang enggan disebut namanya.

Sekjen PDI-P Hasto Kristianto pun menyetujui agenda perombakan kabinet yang bergulir saat ini. Bahkan secara tidak langsung Hasto mempersilakan Presiden untuk memilih Menteri dari Koalisi Indonesia Hebat yang tidak lain adalah rival politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. "Apakah itu berasal dari KMP (Koalisi Merah Putih) atau KIH (Koalisi Indonesia Hebat), kami berpendapat bahwa koalisi-koalisi telah selesai," Hasto setelah menutup Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat, 3 Juli 2015.

Selain itu desakan tambahan kursi untuk PDI-P juga disampaikan oleh Wakil Sekjen Ahmad Basarah. "Seharusnya 12 menteri, tapi itu kan terlalu banyak, jadi sembilan saja cukup," kata Basarah.

Jika teralisasi kemungkinan Pramono akan diplot menjadi

Menteri BUMN menggantikan Rini. Basarah sendiri akan menjadi pengganti Andi. Ditekan oleh PDI-P Rini pekan lalu akhirnya berpamitan kepada parlemen. Sebelum menutup Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI ia mengucapkan kata perpisahan. "Terima kasih atas rapat kerjanya semoga kedepan bisa Kementerian BUMN bisa mewujudkan BUMN lebih baik. Saya juga mengucapkan Minal Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Siapa tahu kedepannya kita enggak ketemu lagi," kata Rini memberikan kata penutup dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Kementrian BUMN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Akankah Rini dan Andi terdepak. Sumber Majalah Aktual menyebut jika permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Presiden, PDI-P akan menarik diri dari kabinet. "Terbuka opsi itu kalau sudah keterlaluan. Bagaimanapun Jokowi kader partai harus patuh," ujar sumber. © Soemitro

# Siapa Menyingkirkan Siapa



**R**ombongan pekerja hiburan mengunjungi Istana Bogor, Minggu 5 Juni lalu. Kedatangan mereka kali ini bukan untuk bernyanyi lagu “Salam Dua Jari”. Abdee Negara gitaris Slank diundang Presiden Joko Widodo untuk berbuka puasa.

Abdee tidak sendiri. Jokowi juga mengundang Olga Lidya, Dira Sugandi, Giring ‘Nidji’, dan Oppi Andaresta. Juga sejumlah cendekiawan dan aktivis, seperti Goenawan Muhammad dan Fadjoel Rachman. Poros relawan inilah yang pada Pilpres lalu ikut memenangkan Jokowi-JK.

Presiden ingin mendapatkan masukan dari kelompok ini perihal perombakan kabinet yang mendesak dilakukan dalam waktu dekat. Oppie membenarkan adanya pembicaraan tersebut. “Salah satu teman artis

tadi ada yang menanyakan *reshuffle*, kemudian Pak Jokowi membalasnya,” ujar Oppie di Istana Bogor, Ahad, 5 Juli 2015. “Tapi ya tidak bahas secara spesifik dan eksplisit,” ujarnya usai pertemuan.

Presiden memang nampak sekali sibuk dengan perombakan kabinet. Sebelum bertemu dengan relawan “Salam Dua Jari” Jokowi pada tanggal 29 Juni juga menggelar pertemuan dengan ekonom di Istana Negara.

Destry Damayanti, Tony Prasentiantono, Lin Che Wei, Raden Pardede dan Arif Budimanta hadir dalam pertemuan itu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi hanya ngobrol santai dengan para ekonom. “Ngobrol saja. Pertemuan ini sudah dilakukan beberapa kali dan seterusnya tetap

*Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie (keempat kiri) bersama (dari kiri-kanan) Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PPP Djan Faridz, Ketua Umum Gerindra Prabowo, Ketua MPP Golkar Akbar Tanjung dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbuka puasa bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Jakarta, Sabtu (4/7).*

dilakukan,” jelas Pratikno, di Istana Negara, Senin, (29/6).

Pratikno kemudian membantah pertemuan tersebut digelar dengan alasan ingin membicarakan kemungkinan adanya rencana perombakan kabinet, terutama pada menteri ekonomi. “Jangan dihubungkan pertemuan itu dengan *reshuffle*,” cetus Pratikno.

Pada pertemuan tersebut sambung Pratikno, presiden hanya meminta masukan ihwal pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pratikno menambahkan jika laporan evaluasi setiap kementerian

yang pekan lalu diserahkan kepada presiden merupakan bagian dari penilaian yang tidak mungkin dipublikasikan. “Saya tegaskan, evaluasi yang dilakukan presiden ini bukan yang pertama, presiden melakukan evaluasi program sejak awal, harus diingat presiden ini bukan orang yang berhenti di level makro, dia juga mengurus kebijakan level mikro,” jelas Pratikno. “Kalau secara fisik, yang beliau lakukan itu blusukan. Blusukan data yang diterima itu dilakukan sejak awal,” sambung dia.

Pernyataan Pratikno berbeda dengan Tony Prasetyantono yang hadir dalam pertemuan selama 1 jam tersebut. Ia mengungkapkan Presiden memang sangat kecewa dengan kinerja tim ekonomi. Bahkan dihadapan tamu undangan Jokowi menyebut siap melantik menteri baru. “Beliau (presiden) bilang, kalau hari ini ketemu orangnya (ekonom hebat .Red) akan saya lantik,” katanya.

Kondisi perekonomian yang lesu memang menjadi perhatian Presiden dalam perombakan kabinet ini seperti dikatakan Tony. Menurut Tony, selain faktor eksternal seperti gejolak finansial di Eropa maupun faktor internal seperti lemahnya harga komoditas, pelemahan ekonomi saat ini juga diperparah oleh lemahnya kepercayaan pasar maupun tidak terpenuhinya ekspektasi pasar terhadap kinerja tim ekonomi dalam kabinet. “Saya *surprise* presiden menyadari itu,” ucapnya.

Faktor politik juga diyakini memberikan pengaruh yang besar dalam kinerja pemerintahan Jokowi. Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengatakan PDIP mendorong Jokowi membuka peluang berkoalisi dengan sejumlah partai non pemerintah, termasuk Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN), dengan tujuan terciptanya stabilitas politik, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Presiden perlu mempertimbangkan dukungan dari partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar dukungan signifikan dan stabilitas

politik dapat terjaga,” ujar Basarah pekan lalu.

Seakan mengamini pernyataan Basarah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan Pemerintahan Jokowi membutuhkan stabilitas politik sehingga sangat memungkinkan menambah kekuatan koalisi untuk mengamankan kebijakan dan program-program pemerintah. “Saya rasa kansnya cukup besar. Karena presiden berhadapan dengan realitas politik yang terfragmentasi sehingga merasa perlu menambah jumlah dukungan politik,” kata M Qodari.

Pada rencana *reshuffle* kabinet kali ini, Basarah mengatakan komunikasi Jokowi dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap terjaga, dan Jokowi pun menyampaikan kepada Megawati informasi tentang evaluasi kabinet, termasuk menteri yang rencananya akan diganti.

“Disampaikan dengan efektif oleh Pak Jokowi melalui Ibu Megawati, hal-hal menyangkut evaluasi kabinet. Siapa menteri kabinet yang akan diganti, saya kira disampaikan dalam konteks Jokowi sebagai kader,” jelas Basarah.

Berbicara peluang, posisi Partai Amanat Nasional (PAN) mempunyai kans paling besar untuk mendapat jatah menteri, apalagi kini komunikasi yang terjalin cukup intens. Selain PAN, Partai Demokrat (PD) juga dinilai berpeluang masuk dalam gerbong pemerintahan karena posisinya selama ini yang tidak masuk pada blok koalisi Merah Putih (KMP).

Indikasi PAN akan bergabung dalam kabinet terlihat dengan kehadiran Ketua PAN dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Puan Maharani, meski tanpa kehadiran Jokowi. Sementara peluang masuknya terungkap dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada akhir Mei lalu. Ia mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang



Yudhoyono membantu pemerintah dalam memberantas mafia minyak dan gas. Selain itu, Jokowi sempat menghadiri Kongres Partai Demokrat di Surabaya medio Mei lalu.

### **Dengan Alasan Etika Politik, PD Menolak Mentah-Mentah Masuk Dalam Kabinet**

Namun tawaran bagi-bagi kursi kabinet ditolak mentah-mentah oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY selaku ketua umum dengan tegas mengatakan jika partai yang dikomandoinya menolak masuk dalam kabinet dan tetap konsisten dalam perannya sebagai partai penyeimbang.

“Saya pegang teguh etika politik. Kami beri kesempatan kepada yang menangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok kalau Partai Demokrat berkeinginan ada di kabinet,” cetus SBY di sela-sela Rapimnas di Jakarta Convention Center, Minggu (5/7).

Namun demikian SBY berharap Pemerintahan Jokowi dapat melakukan perbaikan kabinet. “Kalau harus ada perbaikan di tingkat pemerintahan, maka yang mendapat mandat itulah, teman-teman PDIP dengan parpol yang ada dalam Pemerintahan Pak Jokowi yang mengemban tugas melakukan perbaikan. Kami dukung perbaikan

itu,” ucap SBY.

Pasalnya sambung SBY, posisi Partai Demokrat sudah jelas akan terus mendukung pemerintahan apabila menjalankan aspirasi rakyat. Namun demikian partainya tetap akan mengkritik apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi publik.

### KMP Dukung Kader Partai Koalisi Masuk Kabinet

Sikap berbeda ditunjukkan kubu Koalisi Merah Putih (KMP), seperti diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) saat dikonfirmasi terkait rencana Pemerintah Jokowi menarik kader PAN untuk duduk di kursi kabinet.

ARB mengatakan dirinya tidak mempermasalahakan bila ada partai anggota KMP yang berganti haluan.

ARB mengatakan semua orang boleh diberi kesempatan untuk membangun negeri, termasuk kader-kader Partai Amanat Nasional. “Kalau ajakannya untuk berkontribusi membangun negeri, kenapa tidak,?” ucap dia se usai buka puasa bersama petinggi Koalisi Merah Putih, Sabtu, (4/7)

ARB yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Koalisi Merah Putih mengatakan kontribusi yang sama telah diberikan koalisinya dengan bersikap kritis terhadap Pemerintah Jokowi-JK.

Senada dengan ARB, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz pun tidak mempermasalahakan jika PAN bergabung dalam pemerintah, pasalnya sejak awal KMP sendiri sudah memberi dukungan kepada Pemerintahan Jokowi-JK, tetapi dengan cara kritis. “Tak ada masalah. Sejak awal kami memang mendukung pemerintah,” jelas dia.

Sedangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak mau berkomentar mengenai kemungkinan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah. “Kalau diajak, baru kami kasih nama kader yang berprestasi dan mampu. Tapi sekarang, kan belum,” jelas dia.

### Siapa Terlempar

Perombakan kabinet dengan menambah dukungan politik dari KIH tentu akan memangkas jatah kursi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) paling disorot kinerja menterinya. NasDem memiliki tiga kursi yakni Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno

PKB pun memiliki empat kursi di eksekutif, yakni Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Pekan lalu tanggal 25 Juni Presiden secara khusus memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Muhaimin meyakini Presiden tidak akan mengurai jatah kursi PKB dalam *reshuffle* ini. “Sampai hari pertemuan terakhir saya dengan Pak Jokowi, belum ada menteri dari PKB yang kena *reshuffle*,” kata Muhaimin saat menghadiri Gelar Doa Bersama Sukseskan Muktamar NU ke-33 di DPP PKB, Jakarta, Minggu (5/7).

PKB malah meminta Jokowi untuk mencopot menteri dari kelompok profesional untuk menambah dukungan politik. “Kalau *reshuffle* tujuannya untuk memperbaiki, menterinya harus dari parpol. Bedanya dari parpol punya jaringan di parlemen

dan akar rumput yang tidak dimiliki nonpartai,” ujar Wakil Sekjen Daniel Johan, Rabu (8/7).

Meskipun informasi di lingkungan istana mengatakan Presiden merasa dukungan politik yang diberikan PKB di Parlemen kurang signifikan. Sejumlah momen politik yang menekan istana dari parlemen tidak mendapatkan pembelaan memadai dari PKB menjadi salah satu penilaian.

Menpora Imam Nahrawi dan Menteri Desa Marwan Jafar paling mendapatkan sorotan. Imam sempat masuk dalam radar perombakan saat berseteru dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Namun belakangan ia selamat karena lebih memihak kepada Presiden dari pada ke Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memintanya mencabut pembekuan PSSI.

Marwan disorot oleh PDI-P saat melakukan manuver memperebutkan dana desa dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hingga kini permasalahan tersebut belum tuntas. Marwan belum aman.

Sementara itu Menteri dari NasDem yang paling banyak disorot adalah Menkopolkam Tedjo Edy. Kekacauan di bidang hukum pada awal pemerintahan tidak lepas dari buruknya kinerja Tedjo. Kemungkinan ia akan digantikan oleh mantan Panglima TNI Moeldoko. Hubungan baik Moeldoko dengan Tiongkok menjadi salah satu alasan pergantian ini selain kinerja.

Menteri Pertahanan Ryamizard



Imam Nahrawi



Tedjo Edy



Presiden Joko Widodo (kiri) memaparkan kinerja dan tantangan sektor ekonomi didampingi Ketua ESEI Darmin Nasution (kanan) dalam acara Silaturahmi Dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7).

Ryacudu juga dikabarkan akan diganti. Faktor kesehatan menjadi alasan utama penggantian mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini. Kandidat utama penggantinya adalah politisi PDI-P Tubagus Hasanuddin.

#### Saran Watimpres Kepada Jokowi Terkait Reshuffle

Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Senin (6/7) siang, ada beberapa masukan yang diberikan oleh Watimpres. "Kita memberikan pertimbangan dan nasihat bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita. Karena pertumbuhan ekonomi 4,7%. Kita harus bangkit lagi dan stabilitas ekonomi kita bisa terjaga. Meningkatkan ekonomi agar bisa kompetitif itu hal yang harus dilakukan pemerintah," ungkap Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, di Istana Negara.

Salah satu agenda yang dibahas diantaranya terkait tentang upaya

menggenjot kembali pertumbuhan ekonomi yang masih melambat.

Dalam hal ini sambung Sri, pada kuartal I-2015, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,7% atau jauh lebih lambat dibandingkan periode yang sama dalam beberapa tahun sebelumnya. Untuk mengembalikan kondisi itu, sambung dia, pemerintah masih ada kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu.

Kendati demikian, Sri menilai kondisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Yunani. Yunani resmi menjadi negara maju pertama yang bangkrut akibat gagal bayar utang 1,54 miliar euro (Rp 22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF).

"Saya percaya kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dari Yunani. Tapi kalau kita cermati lembaga kementerian/lembaga yang mengelola sistem keuangan kita sekarang ini lebih baik UU-nya, dan punya mekanisme mengantisipasi perkembangan yang ada," ungkap Sri.

Namun demikian, Sri enggan menuturkan secara detil, terkait saran yang telah disampaikan Watimpres kepada Presiden Jokowi, tetapi intinya banyak hal yang harus diperbaiki ke depannya.

"Kita punya kewajiban

menyampaikan pada presiden perkembangan ekonomi terakhir dan masukan apa yang bisa digunakan presiden untuk memperbaiki kinerja ekonomi kita ke depan. Kita melihat banyak yang perlu disempurnakan," kilah Sri.

#### Jokowi Lirik Darmin Nasution

Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, mendadak terlihat datang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (3/7). Kehadiran mantan Dirjen Pajak bersama Direktur Utama Indosat Alexander Rusli.

Darmin tiba di istana pukul 16.15 WIB, kemudian dengan mengendarai mobil golf dirinya langsung menuju Kantor Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut tidak masuk jadwal resmi Presiden Joko Widodo sehingga kedatangan Darmin kemudian dihubungkan dengan rencana Jokowi menarik Darmin untuk memperkuat pasukannya di pemerintahan.

Sebelumnya Darmin sendiri pernah masuk bursa calon menteri. Kiprahnya di bidang ekonomi dinilai beberapa pengamat cukup mumpuni masuk jajaran menteri ekonomi Jokowi. Namanya sempat disandingkan dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro sebagai calon Menteri Keuangan.

Menjelang perombakan kabinet, selain Darmin sejumlah pakar ekonomi kembali dikabarkan akan masuk kabinet. Selain Sri Mulyani dan Darmin, istana tengah menimbang kemungkinan masuknya mantan Menkeu Chatib Basri serta mantan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dalam struktur kabinet.

Kuntoro diproyeksikan mengganti Adrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nama lain yang muncul adalah Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung. Nama terakhir ini memiliki hubungan dekat dengan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden. Reddy K



# RIZAL RAMLI, SANG PENEROBOS

**M**antan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Era Gus Dur, Rizal Ramli dikenal sebagai “Sang Penerobos” karena ide-idenya yang berani namun tepat sasaran, mendasarkan kepentingan rakyat pada keputusannya. Salah satu prestasi gemilangnya adalah membawa perusahaan plat merah PLN secara finansial dari minus Rp9 triliun menjadi surplus 119,4 triliun tanpa mengeluarkan modal sedikitpun kala itu. Lalu bagaimana pandangan pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI) ini melihat krisis ekonomi yang berada di depan mata? Berikut wawancara tim Aktual dengan beliau.

**Melihat perkembangan perekonomian global, bagaimana pendapat Anda terkait pemerintahan presiden Joko Widodo yang belakangan ini kerjasama investasi condong ke poros Jakarta-Beijing?**

Kerjasama Indonesia-Beijing itu bukan hal yang baru, sejak jaman pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kerjasama itu sudah ada. Selain itu, tidak ada keinginan eksplisit untuk membentuk poros Jakarta-Beijing. Jokowi tahu perekonomian global saat ini sedang

berubah. Perekonomian global sekarang multipolar, memiliki banyak pusat kekuatan. Memang dahulu ada kekuatan Rusia-Amerika, namun setelah perang dingin, Amerika seolah menguasai semuanya. Tapi belakangan ini, perekonomian global memiliki banyak polar (kutub .Red) baru, ada Eropa, Rusia, Tiongkok, dan sebagainya. Saya sendiri ingin Indonesia menjadi kutub tersendiri. Bisa kok, karena Indonesia itu negara yang hebat.

**Bagaimana terkait usaha pemerintahan Jokowi yang belakangan ini sering menjalin kerjasama pinjaman dengan Tiongkok?**

Pinjaman yang dilakukan pemerintah Tiongkok itu harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya kemampuan pemerintah dan swasta ada batasnya. Seperti contoh, pinjaman perusahaan BUMN Garuda Indonesia dengan Tiongkok senilai USD4,5 miliar untuk pembelian pesawat baru Airbus 350. Pesawat tersebut termasuk jenis *long range*, artinya pesawat yang mampu melakukan penerbangan antar benua, seperti Jakarta-Eropa. Namun, pengalaman Garuda selama ini dengan rute Jakarta-Nederland selama ini merugi, kok ini melakukan pinjaman. Menurut

saya, alangkah baiknya jika Garuda Indonesia membeli pesawat jenis regional saja. Konsolidasikan pasaran dalam negeri, baru ke regional seperti Asia. Singapura saja kalah dengan Emirat dan Qatar, itu karena mereka memiliki banyak kantong yang digunakan untuk mensubsidi agar bisa menurunkan harga dan dapat bersaing di pasar global.

Saya ingat, Garuda Indonesia itu nyaris bangkrut sampai Indonesia diancam kalau tidak bayar maka pesawat akan disita. Dengan berbagai usaha, akhirnya masalah tersebut teratasi. Nah sekarang, Garuda Indonesia sudah bagus, tapi sekarang mau dihajar lagi lewat pinjaman luar negeri yang tidak pada tempatnya, beli pesawat bukan pada jenisnya. Terlalu berbahaya jika BUMN terlalu banyak pinjaman. Syarat yang menyertai pinjaman tersebut bakal merugikan Indonesia.

#### **Anggaran yang ada tidak cukup dibiayai APBN, sebagian diperlukan pinjaman luar negeri seperti Amerika dan Tiongkok?**

Anggaran yang diajukan DPR terlalu ambisius, pemerintah juga terlalu ambisius. Pilihannya adalah mengurangi proyek pembangunan infrastruktur atau melakukan pinjaman lagi. Ketika meminjam, kita bisa melakukan ke Bank Dunia atau pembiayaan dari Tiongkok. Namun, ketika meminjam dari Bank Dunia, meskipun dengan bunga murah, mereka akan meminta syarat ini dan itu, kebijakan sampai ke Undang-undang. Itu sama halnya dengan menjual kedaulatan kita.

Kedua, melakukan pembiayaan dari Tiongkok. Mereka tidak menggunakan syarat dan prasyarat, namun lebih pada tataran komersial. Sebaiknya memang kita lebih cerdas menggunakan kesempatan. Ada cara lain memobilisasi modal Indonesia. Kalau terpaksa pinjam Bank Dunia, kita pertimbangkan betul. Kita gunakan syarat *business to business* saja.

Ketiga, jangan gunakan uang

pinjaman secara gampang, asal beli barang yang tidak perlu. Padahal nggak sanggup bayar, jangan seperti itu.

#### **Perlu kah pinjaman untuk menggerakkan perusahaan BUMN?**

Saya akan prioritaskan cara-cara lain, pinjaman itu adalah cara konvensional. Lalu apa yang bisa kita lakukan selain melakukan pinjaman?

Pertama, kita dapat melakukan revaluasi aset BUMN setelah revaluasi bisa naik 4-5 kali. Pasalnya, aset BUMN itu nilainya masih secara historis. Setelah dilakukan revaluasi aset, maka modal BUMN akan meningkat besar sekali. Dengan modal yang besar, perusahaan BUMN bisa melakukan *refinancing* melau global *bond* dan sebagainya. Bukan lagi melalui APBN, kita harus meninggalkan infrastruktur yang harus dibiayai APBN.

Kedua, saat ini penjualan ritel rata-rata merosot 30%. Artinya, ada kapasitas berlebih industri sebesar 30 persen, banyak pabrik berhenti produksi. Pegawai masih dibayar. *Ngapain* bikin produksi barang namun tidak laku. Lebih bagus pabrik ditutup, tak bayar listrik, hanya bayar buruh saja.

#### **Bagaimana melihat krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, apa yang seharusnya dilakukan?**

Kita harus melihat krisis itu sebagai *opportunity*, krisis ekonomi dan kesempatan itu satu poin yang sama. Bagi pemimpin yang hebat, akan membuat krisis itu menjadi kesempatan untuk meloncat ke arah yang lebih bagus. Namun pemimpin yang payah, akan tenggelam bersama krisis.

Contoh sederhana. Musim hujan petani tak mau menanam cabe, karena faktor resiko diserang hama dan gagal panen, tapi saat musim hujan itulah cabai menyentuh harga paling bagus. Kalau musim biasa harga cabai murah. Orang yang berani akan mengambil kesempatan untuk

menanam cabe di musim hujan. Memang dia harus mengatasi masalah hama, tapi setelah bisa melewati masalah tersebut, dia akan mampu menjual cabe dengan harga yang bagus, mereka akan kaya raya.

Dalam perkembangan seperti gelombang, naik turun dan gejolak. Saat ini kita punya 30 persen kapasitas berlebih, rupiah jatuh, justru ini kita gunakan untuk meningkatkan ekspor. Pemerintah bisa membantu dengan memfasilitasi kredit ekspor, namun pengusaha juga tidak serta merta seandainya, harus dipilih yang benar-benar berusaha.

#### **Bagaimana dengan asumsi makro yang disampaikan pemerintah pada awal pemerintahan pertumbuhan ekonomi di angka 5,7. Namun pada saat ini, Bank Dunia menyebut hanya menyentuh angka 4,7?**

Memang asumsi makro pertumbuhan ekonomi kita masih dalam kondisi merosot terus. Yoy 4,7. *Bottom*-nya belum akan tercapai. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum tentu salah pemerintah Jokowi. Dua setengah tahun lalu, saya mengingatkan pemerintah SBY akan permasalahan yang dihadapi menyangkut empat defisit. Pertama defisit neraca perdagangan, tadinya surplus akhirnya menjadi turun. Kedua defisit transaksi berjalan. Ketiga defisit neraca pembayaran, dan terakhir defisit anggaran. Sayangnya pejabat, ekonom, media hanya bicara defisit anggaran, padahal yang berbahaya adalah tiga defisit tersebut (neraca pembayaran, perdagangan dan transaksi berjalan). Ini lebih berbahaya secara finansial, namun tidak dilakukan apa-apa. Ini yang akhirnya diwariskan ke pemerintahan Jokowi.

Nah, sayangnya euforia tim ekonomi Jokowi terlalu berlebihan. Mereka tidak memperhatikan ekonomi Indonesia sedang bergeser dari hijau ke lampu kuning, bahkan sebentar lagi menuju lampu merah.



Pemerintah Jokowi seharusnya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi empat defisit.

**Bagaimana cara agar pertumbuhan ekonomi bakal meningkat lagi?**

Kami percaya bisa membalikkan ini dalam dua tiga kuartal. Prinsip utamanya, krisis itu adalah kesempatan. Mesti berani berpikir ‘out the box’. Kedua, memupuk *trust* (kepercayaan). Pemerintah minta pedagang hingga perusahaan optimis tapi perdagangan terus menurun.

*Trust* itu pertama menyangkut orang, *track record* dan kemampuan menangani krisis. Kedua harus berani mengambil *bold* inisiatif. Diperlukan inisiatif yang besar, tidak bisa yang biasa-biasa saja.

Contohnya kenapa tidak disikat saja mafia impor pangan. Kalau pemerintah melakukan itu perubahan sistem kuota ke sistem tarif. Harga telur, kedelai, daging bakal turun 30 persen. Kalau hal itu dilakukan,

harga kebutuhan pokok akan turun, rakyat akan senang, ini betul-betul pemimpin yang pro rakyat.

Kok tidak berani sikat mafia impor pangan ada apa? Pejabatnya hanya bisa menaikkan harga. Karena paradigmanya hanya menaikkan harga, golongan menengah tidak suka dengan hal itu. Indonesia bakal semakin tidak kompetitif. Ganti paradigma pejabat dengan ‘turunin harga’. Bisa apa gak? Bisa banget. Karena banyak BUMN yang masih KKN.

**Bagaimana melihat investasi asing yang mementingkan kepentingan asing dengan investasi yang mementingkan kepentingan rakyat?**

Pedoman utamanya adalah sebesar-besarnya Sumber Daya Alam itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Peran pemerintah harus besar. Untuk sektor manufaktur, bolehlah dimanfaatkan investasi asing. Tapi

harus ada transformasi teknologi. Karena sektor manufaktur menjanjikan tenaga kerja yang banyak. Namun yang terjadi saat ini adalah kemerosotan industrialisasi.

Saat ini, melemahnya nilai tukar rupiah bisa dimanfaatkan untuk menggenjot manufaktur, namun banyak juga hal lain menghambat. Biasanya dalam hal pembebasan tanah. Presiden Jokowi sudah ada kemajuan, jangan lagi ganti rugi, tapi ganti untung. Misalnya proyek infrastruktur. Wajar dong, rakyat diberikan keuntungan sedikit. Di India, rakyat selain mendapat uang tunai juga dapat saham. Konsepnya saya setuju dengan ganti untung. Pasalnya biaya penggantian tanah itu hanya 15 persen dari total pembiayaan. Kalau naik, maksimal hanya 18 persen.

Saat ini kita tidak bisa seperti dulu menggunakan tentara main gusur. Saat ini saatnya bagi pemimpin yang memiliki kreatifitas tinggi. ◦

# 'PAK BOS' DALAM KEPUNGAN

**M**obil berwarna merah menyala itu melaju dengan kencangnya di tanjakan Tawang Mangu, Magetan, Jawa Timur, 5 Januari 2013. Di belakang kemudinya adalah Dahlan Iskan yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengendarai mobil bertenaga listrik yang diberi nama Tuxuci itu, Dahlan sukses melintasi tanjakan Cemoro Sewu yang terkenal terjal.

Namun nahas saat melintasi lereng timur Gunung Lawu tepatnya di Desa Ngerong. Mobil seharga Rp3 milyar itu menabrak tebing. Rem mobil yang semula bekerja dengan baik mendadak blong. Mobil yang tak mampu dikendalikan Dahlan akhirnya ringsek. Beruntung Dahlan selamat dari musibah itu. "Baik juga saya sendiri yang mencoba mobil ini sehingga saya sendiri dan risikonya saya yang menanggung," kata Dahlan saat itu.

Sejak menyandang status sebagai pejabat negara Dahlan memang punya ketertarikan yang besar terhadap mobil listrik. Meskipun sempat mengalami kecelakaan Dahlan tidak kapok. Ia kemudian mengembangkan lagi mobil bertenaga listrik yang kemudian dikenal dengan nama Selo. Mobil berwarna Kuning terang tersebut dipamerkan dalam acara KTT APEC di Bali bulan Oktober 2013 silam.

Bersama dengan pengembangan mobil Selo, Dahlan juga membuat 16 mobil listrik yang akan dipakai sebagai kendaraan operasional saat konferensi digelar. Namun siapa sangka mobil listrik inilah yang kemudian menyeret Dahlan dalam kasus korupsi. Tanggal 17 Juni lalu Dahlan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi proyek ini.

Pria yang biasa dipanggil 'Pak Bos' di lingkungan Jawa Pos Group tersebut datang bersama dengan



pengacaranya yakni Yusril Ihza Mehandra. Hingga saat ini Dahlan masih berstatus sebagai saksi untuk dua tersangka yakni Agus Suherman mantan pejabat di BUMN dan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama di pengadaan 16 unit mobil listrik, Dasep Ahmadi. "Jadi mobil itu digunakan pada saat APEC 2013. Jumlahnya ada 16, tapi ya bisa dikatakan mengalami kegagalan sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Kami ingin mendapatkan kejelasan soal ini," ujar Jaksa Agung M. Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Rabu (10/6).

Prasetyo menjelaskan alasan

penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan kembali memanggil Dahlan karena ditemukan sejumlah kejanggalan pada suku cadang yang dipergunakan pada mobil listrik itu, diantaranya penggunaan suku cadang mobil Toyota Alphard tahun 2005 yang telah dimodifikasi.

Alasan lain, kata Prasetyo, mobil listrik tersebut juga ditolak oleh Kementerian Perhubungan saat uji kelayakan jalan. Dalam hal ini Kejaksaan, lanjut Prasetyo mengambil kesimpulan jika mobil listrik tersebut bukan bertujuan untuk riset seperti yang digaungkan Dahlan selama ini. "Satu di antaranya pakai Alphard

# 5 RASUAH



Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan (kiri) kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) berjalan keluar ruangan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6).

Foto kanan: Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Waluyo (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kejati DKI Jakarta, Jakarta, (11/6).

2005. Ketika diminta sertifikasi uji kelayakan Kemenhub pun akhirnya ditolak. Ya gimana, bukan riset. Kalau selama ini dikatakan riset, ya terserah dia,” cetus Prasetyo.

Kasus ini bermula di tahun 2013 kala itu Dahlan Iskan menjabat Menteri BUMN, dia menugaskan sejumlah BUMN yakni PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT BRI untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik guna mendukung kegiatan operasional KTT APEC tahun 2013 di Bali. Pada kasus ini, Jaksa menduga terjadi penyimpangan pasalnya ke-16 mobil tersebut akhirnya tidak

dapat digunakan. Hingga akhirnya keenambelas mobil itu dihibahkan ke enam universitas yaitu UI, ITB, UGM, Unibraw dan Universitas Riau.

Ada 10 mobil listrik telah disita pihak Kejagung untuk kepentingan penyidikan. Dari 10 mobil itu, hanya dua yang dibawa ke Kejagung, sedangkan sisanya tidak dibawa ke Kejagung tetapi berada di bawah pengawasan jaksa penyidik.

Sebelumnya Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra menyebut jika pengadaan 16 mobil listrik untuk tamu KTT APEC tahun 2013 di Bali, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karenanya kata Yusril tidak ada korupsi apalagi kerugian negara dalam pembelian mobil tersebut. “Kalau tiga BUMN memesan mobil listrik untuk promosi mereka, tidak ada kaitannya dengan APBN,” kilah Yusril di Jakarta, Senin (22/6).

Dahlan sendiri kaget dengan tindakan Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dalam proyek ini. Dalam surat terbukanya di *Gardudahlan.com* ia menulis kekecewaannya. “Saya bersedia mengganti seluruh pengeluaran *sponsorship* maupun CSR untuk pengadaan mobil listrik kalau memang proyek tersebut tidak diperbolehkan menggunakan dana *sponsorship* atau CSR,” ujarnya.

Kasus mobil listrik baru satu dari empat kasus yang kini menyeret Dahlan dalam serangkaian pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Polri. Sebelumnya mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut telah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi pembangunan gardu listrik Jawa-Bali.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Waluyo menegaskan jika kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan 21 Gardu Induk (GI) tahun anggaran 2011-2013 yang melibatkan Dahlan Iskan, akan dituntaskan

Waluyo mengatakan hingga kini penyidik masih terus mendalami keterlibatan Dahlan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek yang nilainya mencapai Rp1,063 triliun tersebut. “Lanjut terus sampai tuntas,” cetus Waluyo, Sabtu (4/7).

Dengan alasan tersebut, Waluyo mengatakan pihaknya akan memanggil kembali mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun, mengenai waktunya belum dapat dipastikan.

Sabtu (25/6) pekan lalu, penyidik Kejati DKI telah melakukan pengeledahan di kantor PLN Jakarta guna mencari dokumen-dokumen yang menjelaskan kapasitas Dahlan



*Seorang melihat kondisi mobil listrik yang terparkir di halaman belakang Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2015).*

Iskan sebagai KPA di proyek gardu induk, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan pengadaan dan pengajuan proyek multiyears.

Pihaknya kata Waluyo berhasil menemukan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan Dahlan selama berjalannya proyek *multiyears* itu.

Proyek tersebut diperkirakan

menelan anggaran sebesar Rp1,06 triliun, dan diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp33 miliar. Atas kasus ini, Dahlan diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Proyek Gardu Induk tahun 2011-2013 dan Proyek Mobil Listrik untuk KTT Apec 2013 di Bali, Dahlan Iskan juga terjerat kasus lainnya,

diantaranya kasus Sawah Fiktif tahun 2012-2014, dengan nilai proyek Rp 1,4 triliun, dana tersebut berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejumlah BUMN. Pada kasus ini Dahlan berstatus sebagai saksi, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp. 200 milyar. Kasus ini kini ditangani oleh Bareskrim Polri, Dahlan kala itu menjabat menteri BUMN dan dituduhkan telah menerbitkan surat keputusan program.

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisararis Besar



*Tim penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung memeriksa dokumen terkait mobil listrik di pabrik perakitan mobil listrik PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Jalan Kp. Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, Selasa (7/7).*

Ade Deriyani mengatakan proyek bermasalah tersebut diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Sejumlah BUMN pun disebut mendanai proyek itu.

Ade tidak mengatakan BUMN mana saja yang mendanai proyek ini. Namun berdasarkan informasi, proyek cetak sawah tersebut diselenggarakan antara lain oleh BNI, Askes, Pertamina, Pelindo, Hutama Karya, BRI, dan PGN. Nilai proyek diperkirakan mencapai Rp317 miliar. Belum disebutkan berapa kerugian negara atas kasus ini.

Sejumlah BUMN menyerahkan proyek ini kepada PT Sang Hyang Seri. Namun PT Sang Hyang Seri menyerahkan kembali proyek itu ke PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Yodya Karya.

Badan Pemeriksa Keuangan menyebut proyek cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, yang kini terindikasi dugaan korupsi, direncanakan dengan tidak benar. "Perencanaannya tidak direncanakan dengan baik, mulai dari lokasi, pelaksanaan, sampai monitor, sehingga seolah mendadak dan asal-asalan," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi. Temuan BPK ini sebut Achsanul telah diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk ditindaklanjuti.

Kasus lainnya, yakni Pengadaan tanah di Jawa Timur tahun 1999-2009, dengan nilai aset, yakni tanah 904.024 meter persegi, bangunan 235.793 meter persegi. Dalam kasus ini Dahlan sebagai saksi dan kasus tengah ditangani Kejaksaan Tinggi

Jawa Timur, Peran Dahlan yakni saat dirinya menjabat Direktur Utama PT Panca Wira Usaha, salah satu BUMD Provinsi Jawa Timur.

Dahlan juga tengah diperiksa terkait pengadaan bahan bakar minyak oleh PLN. Kasus ini tengah ditangani Bareskrim Polri. Menurut Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso alias Buwas, Senin (22/6), pada kasus ini belum ada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dahlan sendiri lanjut Buwas dimintai keterangan seputar pengadaan high speed diesel yang diadakan melalui pembelian langsung dan tender sejak 2010. Pada kasus ini polisi menduga ada kerugian negara akibat selisih harga tersebut, Pada kasus ini polisi akan menjerat bakal tersangka dengan UU Tipikor Pasal 2 dan 3 juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Terhitung hingga kini ada lima kasus rasuah yang mengempung pemenang Konfensi Calon Presiden Partai Demokrat tersebut. Semua kasus berjalan setelah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diganti oleh Joko Widodo. Dahlan sendiri mengaku siap menjalani semua kasus yang menjeratnyanya. "Saya biasa-biasa saja," tegasnya. © Dedy Kusnaedi

## KPK Geledah Kantor Gubernur Sumut Terkait Suap Hakim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara.

Sebelum menggeledah rumah Gatot, KPK menyambangi rumah dinas Panitera Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan Syamsir Yusfan. Dari penggeledahan ini KPK menyita uang sebesar USD700. "Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

KPK memang tengah mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan

menangkap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, anggota majelis hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan, serta seorang pengacara dari kantor advokat OC Kaligis M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry. Penangkapan dilakukan pada Kamis (9/7).

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu ditemukan juga uang USD15 ribu (sekitar Rp 195 juta) dan 5 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 45 juta) di kantor Ketua PTUN.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/7) mengatakan, tindak pidana korupsi itu terkait dengan proses pengajuan PTUN di Medan yang dilakukan mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis.

Gugatan ke PTUN ini dilakukan

atas terbitnya sprinlidik (surat perintah penyelidikan) berkaitan dengan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dengan UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi bansos di provinsi Sumatera Utara.

Zulkarnain mengungkapkan, tindak pidana korupsi ini juga bisa saja terkait dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ada pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai ketentuan terkait pemberian bansos.

"Ada laporan masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana dari kejaksaan sehingga dilakukan penyelidikan, berkaitan dengan penyelidikan ini pihak dari Pemprov Sumut kelihatannya mengajukan gugatan ke PTUN melalui jasa pengacara ini," tandas Zulkarnain.

/Moh Sahlan



Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, akhirnya mendekam di ruang tahanan Guntur sejak Jumat 10 Juli 2015. Dia langsung digelandang ke dalam mobil tahanan setelah menjalani

## Mantan Walikota Makassar Ditahan KPK

pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Sebelum dibawa ke ruang tahanan, Ilham yang mengenakan rompi warna oranye diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 6 jam dan terlihat meninggalkan Gedung KPK pada pukul 14.38 WIB. "Penahanan terhadap saudara IAS dilakukan demi kepentingan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Ilham sendiri mengaku akan taat menjalani semua proses hukum yang menimpanya. "Saya menghormati dan menghargai keputusan ini, apapun yang menjadi keputusan saya harus menghargai, dan akan ikut prosedurnya," ujar Ilham kepada wartawan.

Ditanya tentang kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, Ilham dengan tegas menyebut

orang dari PT Traya sebagai pihak ketiga. "Pihak ketiga, dari PT Traya," tegasnya.

KPK memang telah menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengki Widjaja sebagai tersangka dalam kasus ini. PT Traya merupakan pihak swasta yang diketahui dengan PDAM melakukan kerjasama dalam proyek rehabilitasi, kelola, dan transfer terkait pengelolaan air.

Ilham diduga melakukan penyalahgunaan kewenangannya selaku Wali Kota sesuai dengan pasal yang disangkakan padanya. Akibat perbuatannya itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp38,1 miliar.

Ilham disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

/Moh Sahlan

## Gubernur Bengkulu Diperiksa Dalam Kasus Korupsi Honor

Penyidik Bareskrim Polri terus mendalami peran Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsah dalam kasus dugaan korupsi pembayaran honor Tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, Bengkulu tahun 2011 senilai Rp5,4 miliar.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menegaskan, status Junaidi masih saksi meski tidak tertutup kemungkinan akan dinaikkan menjadi tersangka. "Sekarang belum (tersangka). Nanti pastinya kalau sudah ada fakta, ditetapkan tersangka," ujar Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).

Jenderal bintang tiga yang akrab disapa Buwas itu mengaku tak ingin sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adapun jika telah menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka pihaknya tidak takut digugat praperadilan.

Junaidi pertama kali diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai saksi. Junaidi Hamsyah diketahui mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor Z.17

XXXVIII tahun 2011 tentang pembinaan manajemen RSUD M Yunus.

Dalam tim itu terdapat nama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. SK itu dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas.

Berdasarkan Permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah tidak mengenal tim pembina. Kasus ini kemudian diusut Polda Bengkulu dan berhasil menetapkan beberapa tersangka, termasuk Direktur RSUD M Yunus Bengkulu yang ketika itu dijabat Zulman Zuhri. Kasus ini telah dilimpahkan Polda Bengkulu ke Mabes Polri pada 24 April lalu. Pelimpahan tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan.

Gubernur Bengkulu melalui pengacaranya, Muspani membantah telah terjadi korupsi. Muspani mengklaim penerbitan SK itu sudah sesuai dengan prosedur. Dia membantah SK itu bertentangan dengan Permendagri nomor 61 tahun



2007 tentang Dewan Pengawas.

Berdasarkan Permendagri tersebut, Badan Layanan Umum Daerah tidak mengenal tim pembina. Malah, Muspani menegaskan, SK itu merupakan turunan dari Permendagri nomor 61. "Jadi Tim Pembina Rumah Sakit M Yunus dibentuk karena sistem BLUD, karena untuk mengawasi rumah sakit," beber Muspani. /Moh Sahlan

## Honggo Wendratno Diperiksa Setelah Dua Kali Mangkir

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri memeriksa tersangka Honggo Wendratno (HW) terkait dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI dan BP Migas (SKK Migas).

Bekas bos PT TPPI itu digarap sebagai saksi di kedutaan Republik Indonesia di Singapura. "Sedang dilakukan pemeriksaan," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pertengahan Juli 2015.

Pemeriksaan Honggo dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak, dengan didampingi dua penyidik.

Pria yang akrab disapa Buwas



ini mengungkapkan, seandainya pemeriksaan tidak bisa diselesaikan hari ini, maka akan dilanjutkan besok. "Kalau hari ini selesai, mungkin besok tambahan," imbuh jenderal bintang tiga jebolan Akademi Kepolisian 1984 ini.

Penyidik Bareskrim akhirnya

dapat memeriksa HW pada Kamis (9/7). Sebelumnya, Honggo sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik karena beralasan sakit dan menjalani perawatan di Singapura. Untuk mempercepat proses pemberkasan, kemudian penyidik memutuskan memeriksa Honggo di negara persemakmuran Inggris tersebut.

Sementara pemeriksaan dua tersangka lainnya yaitu mantan Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono (DH) dan bekas Kepala BP Migas Raden Priyono (RP) akan dilakukan setelah pihaknya memeriksa HW di negara persemakmuran Inggris tersebut.

Penyidik juga menargetkan penyerahan berkas tahap satu perkara dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara ke Kejaksaan dilakukan pada bulan ini. /Moh Sahlan

# Pertumbuhan Ekonomi Indonesia **Tergelincir**

Bank Dunia melayangkan kritikan halus kepada pemerintah Indonesia dengan merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2015 dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen. Bukannya berbenah, tim ekonomi Presiden Jokowi-JK sibuk menyanggah.

**M**enyepelekan masalah tanpa upaya maksimal melakukan perbaikan adalah langkah cepat menuju keterpurukan. Kondisi inilah yang menghantui Indonesia. Pemerintah pimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sampai harus diperingatkan Bank Dunia untuk sadar bahwa kondisi perekonomian negeri ini sedang rapuh.

Melalui diskusi tentang Laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ), Bank Dunia mengoreksi prediksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, yakni menjadi 4,7 persen dibanding kalkulasi Bank Dunia sebelumnya sebesar 5,2 persen. Beberapa pekan sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) juga membuat asumsi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5%.

Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari Bank Dunia dan ADB tentu tidak bisa dipandang remeh, apalagi Indonesia Economic Quarterly (IEQ) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 4,7 persen merupakan tingkat pertumbuhan paling lambat sejak tahun 2009.

"Kondisi seperti rendahnya harga komoditas dan melemahnya pertumbuhan investasi terus menekan, sehingga (pertumbuhan) ekonomi Indonesia terus melambat," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, **Rodrigo Chaves** dalam penyampaian Laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu 8 Juli 2015.



Rodrigo Chaves

*Chairman, Indonesian Association of Planners, Bernardus Djonoputro, Dekan Fakultas Ekonomi UI, Ari Kuncoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara dan Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop menjadi narasumber dalam IEQ Juli 2015 Bank Dunia di Jakarta, Rabu, (08/07).*

Yang menarik, sehari sebelumnya (7 Juli) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membatalkan 6.351 surat persetujuan (SP) atau izin prinsip (IP) penanaman modal asing (PMA), dengan rencana investasi sebesar Rp279 triliun pada 2000-2006. Dan 1.460 SP/IP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan rencana investasi Rp305,9 triliun.

Menurut Kepala BKPM, Franky Sibarani pembatalan ini merupakan tahap kedua, setelah sebelumnya BKPM juga membatalkan atas 6.541 surat persetujuan PMA pada 2007-2012. "Kami batalkan dalam rangka menegakkan aturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal," ujar dalam keterangan resminya, Selasa (7/7).



Indonesia juga akan mengalami penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat melemahnya pertumbuhan investasi jangka panjang dan belanja konsumen. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melambatnya konsumsi masyarakat. Hal ini tentu terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah yang kurang jeli menopang daya beli masyarakat.

Rodrigo juga menyebut Indonesia termasuk negara yang terkena dampak penurunan permintaan komoditas yang terjadi sejak 2012. Kemudian terjadi pelambatan investasi dan penurunan terhadap permintaan ekspor komoditas unggulan.

Tim ekonomi pemerintah memang dituntut lebih bertaji dalam menghadapi tantangan fiskal.



Rodrigo menyarankan agar Indonesia melenyapkan hambatan-hambatan pembelanjaan modal dengan target terjadi peningkatan anggaran pengeluaran hingga dua kali lipat.

Kelemahan kinerja ekonomi pemerintah juga menyolok dari sisi penerimaan. Target peningkatan pendapatan pajak hingga 30 persen tak mampu dipenuhi, karena hingga Mei 2015 penerimaan pajak justru turun 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rodrigo mengakui sistem pelaporan pajak secara elektronik cukup baik, namun itu saja belum cukup. Harus ada terobosan lebih banyak untuk meningkatkan penerimaan pajak agar bisa membantu kondisi fiskal dalam jangka menengah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia,

akan bisa terkerek jika belanja infrastruktur segera direalisasikan. Sebab belanja infrastruktur pada akhirnya akan mendorong nilai investasi dan meningkatkan defisit transaksi berjalan Indonesia dalam jangka pendek.

"Indonesia dapat bertindak dengan meningkatkan belanja infrastruktur yang berkualitas selama tetap menjaga defisit fiskal dalam batasan 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto)," terang Rodrigo, seraya menambahkan infrastruktur memadai akan mengurangi biaya logistik dan harga berbagai barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Bank Dunia menganalisa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Ekonom

Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop menyebut tiga fakta global yang mempengaruhi pelemahan ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi global, permintaan ekspor, dan investasi.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi global masih melambat, meski pun AS menunjukkan pemulihan. Sedangkan penurunan ekspor terjadi akibat pelemahan ekonomi di Tiongkok. Diop memberi penekanan bahwa komposisi investasi di Tiongkok bergerak dari investasi yang padat komoditas. Hal ini berdampak besar bagi ekspor seluruh dunia.

"Tahun 2005-2011 termasuk awal krisis ekonomi global 2002, impor Tiongkok dari Indonesia 31,5 persen setiap tahun, 2012-2014 impornya dari Indonesia turun. 2014 bahkan minus 25 persen," beber Diop.

Terakhir, Diop mengingatkan bahwa faktor investasi merupakan beban terbesar penyebab lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi saat ini turun 50 persen dibandingkan 2012, tapi pada dua kuartal terakhir juga mengalami tekanan. "Ini sangat berkaitan dengan dampak kedua. Karena (ekspor) komoditas melambat, maka ini berdampak pada ekonomi. Faktanya, ini akan memengaruhi tenaga kerja," tandas Diop.

Mendengar koreksi dari Bank Dunia, pemerintah bukannya berbenah melainkan sibuk mengeluarkan bantahan. Pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suhasil Nazara berseru bahwa perekonomian Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang strategis.

"Tahun pertama mengalami pelemahan adalah hal yang wajar. Namun itu bukan berarti terjadi pelemahan," tukas Nazara yang menjadi pembicara dalam diskusi Indonesia Economic Quarterly (IEQ) Bank Dunia.

Nazara mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa dilihat secara utuh dalam satu semester saja. Sebab, pemerintah baru



Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (dari kanan-kiri) Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinov Chaniago, Menteri PU Basuki Hadimuljono, serta Menkominfo Rudi Antara mengikuti acara *Silaturahmi Dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7)*. Dalam Acara tersebut presiden memaparkan masalah ekonomi di Indonesia serta mencari solusi dengan berdialog dengan ekonom dan pelaku usaha.

mulai menentukan anggaran pada Maret 2015. Dia juga mengungkit kembali 'kesuksesan' pemerintah mencabut subsidi BBM yang dinilai telah menyehatkan postur APBN Indonesia. Sayangnya, Nazara tidak bisa memaparkan sejauh mana efektivitas pengalihan subsidi BBM, serta sejauh mana tekanan ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok setelah melepas harga BBM ke mekanisme pasar.

“Dengan pola pikir dan anggaran baru, penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) membuat perekonomian menjadi lebih sehat. Ini pertama kalinya belanja pemerintah infrastruktur lebih besar dibanding subsidi,” sergahnya.

#### **Awat! Utang dan Pelamahan Nilai Tukar**

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 tercatat USD298,1 miliar, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, beberapa pihak khawatir Indonesia tak mampu bayar utang, karena nilainya bisa terus membengkak jika melihat kondisi finansial di dalam negeri. Utang berbentuk valuta asing jelas akan semakin membebani debitur dan perekonomian dalam negeri karena nilai rupiah yang terus melemah mendekati Rp14.000 per

dollar AS.

Apalagi ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro (2 Juli) mengatakan bahwa defisit anggaran pada akhir 2015 diproyeksikan mencapai 2,23 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 260 triliun. Melebar dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 1,9 persen terhadap PDB.

“Memang defisit akan melebar, tentunya ini *worst case* kalau penerimaan perpajakan hanya 92 persen, tapi kita upayakan pajak tetap tinggi,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7).

Menkeu menjelaskan dengan tambahan defisit senilai sekitar Rp 260 triliun itu, maka Indonesia seyogyanya perlu tambahan utang lagi dari pinjaman dari berbagai lembaga multilateral, bukan dari penerbitan SUN.

“Perlu ada pembiayaan tambahan Rp38 triliun yang akan diupayakan dari pinjaman multilateral maupun bilateral, seperti World Bank, ADB, Jerman sama Jepang, bukan mencari dari pasar SUN, untuk menutup defisit anggaran,” katanya.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan bahwa Indonesia perlu waspada terhadap ULN,

meskipun hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebihan. “Saya setuju bahwa ULN, khususnya swasta adalah unsur penting yang harus dicermati. Apalagi kalau dari PDB (Produk Domestik Bruto) ini masih masuk, dan secara nominal turun, ada risiko depresiasi, dan BI harus lakukan kebijakan atasi hal tersebut,” ujar Diop.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada kuartal IV-2014, ULN Indonesia tumbuh 10,20 persen (yoy), sementara memasuki kuartal I-2015 tumbuh sebesar 7.6 persen. Dilihat dari jumlahnya, posisi ULN pada akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar USD298,1 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD132,8 miliar (44,5 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD165,3 miliar (55,5 persen dari total ULN).

Soal utang ini, Suhasil Nazara selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengakui, ULN merupakan pekerjaan rumah bagi kita yang tidak mudah untuk diperbaiki. “Terutama struktur kantor dan pengelolaan. Salah satunya dengan pajak, ekstensifikasi adalah salah hal yang dapat dilakukan,” ucap Nazara.

Managing Partner HD Asia Advisory, Bernardus Djonoputro mengatakan ULN dapat diselesaikan jika sektoral atau konsumen tumbuh dengan baik. Dia pun menilai membangun transformasi massal dengan baik akan mampu menyelesaikan ULN yang ada.

“Bila kita lihat siklus bisnis di Eropa atau AS, kita punya waktu untuk pendekatan yang sifatnya lebih kohesif. Semua orang bergerak dengan strateginya sendiri,” kata Bernardus. *Moh Sahlan*



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliyah (tengah) bersama Guru Besar UI Irwandi (kanan) dan Dirjen Kemensos Samsudi (kiri) menjadi pembicara dalam acara diskusi legislasi dengan tema "RUU Disabilitas", di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

## RUU Disabilitas, Upaya Melindungi Hak-hak Kaum Disabilitas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015. RUU yang diinisiasi DPR itu diharapkan rampung pada akhir tahun ini setelah terkatung-katung sekitar tiga tahun.

Diperjuangkan sejak tahun 2012, RUU Disabilitas akhirnya bisa masuk dalam Prolegnas 2013. Sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada RUU yang mengatur hak-hak kaum difabel tersebut. DPR baru periode 2014-2019 dengan semangat baru kembali memasukkannya dalam Prolegnas 2015.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliyah, mengatakan, permasalahan yang dihadapi kaum difabel sangat mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya. Terlebih aturan yang ada, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dinilainya sudah tidak kekinian.

"Undang-Undang yang sekarang sudah tidak relevan. Kami melihat ini (revisi) suatu hal yang penting," tegasnya dalam

diskusi Forum Legislasi tentang RUU Disabilitas di Pressroom Nusantara III Gedung DPR RI, Selasa (30/6).

Disinggung bagaimana validitas data kaum difabel di Indonesia. Pemerintah menyatakan ada sekitar 2 juta, sementara World Health Organization (WHO) menyebut 10 juta. Selain perbedaan itu, ia juga menekankan pentingnya hak-hak kaum difabel ke depan yang perlu diperhatikan.

Kedua, adanya perkembangan lingkup ragam disabilitas. Misal masuknya gangguan jiwa yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas mental dan intelektual.

"Ketiga, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan tindak kriminal. Ini semua semakin menguatkan agar diberikan penyelesaian, paling tidak dengan UU sebagai payung hukum," kata Ledia.

Politisi PKS itu menambahkan, beberapa pasal krusial pada draft RUU Disabilitas yang terdiri 200an pasal menekankan pula fasilitas dan

infrastruktur pendukung kegiatan penyandang disabilitas. Termasuk peran serta Pemerintah Daerah dan pembentukan badan di tingkat nasional yang mengontrol dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"Komite Nasional itu nanti dapat meng-endorse cara pandang pemerintah. Kami berharap sebelum berakhir masa sidang ini, sudah bisa diharmonisasi, agar bisa segera disetujui menjadi draf DPR," katanya.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial (Kemensos), Samsudi, menyatakan penyebutan kata 'cacat' sudah dihapus dan digantikan dengan kata 'penyandang disabilitas'. Persepsi publik ini penting dirubah.

"Kami sifatnya menunggu drafnya, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama. Kenapa kita buru-buru secepatnya, karena RUU ini kan sudah tahun lalu. Kita sudah meratifikasi tapi UU-nya belum selesai-selesai," jelas dia.

Dengan difasilitasi hak-haknya, pemerintah berharap ke depan kaum disabilitas mendapatkan tempat yang layak dilingkungan sosialnya. Terlebih RUU Disabilitas bukan hanya menjadi perhatian Kemensos, melainkan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian terkait lainnya. (adv)

## Saratoga Caplok Saham Taksi Express

Hasrat Saratoga Investama Sedaya membeli saham PT Express Trasindo Utama Tbk (TAXI) akhirnya terwujud. Perusahaan yang pernah membesarkan nama Sandiaga Uno ini juga mendorong anak usahanya PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) dan Golden Valley Advisor Inc untuk ikut serta mengakuisisi 51% saham TAXI dari PT Rajawali Corpora.

Rajawali bersama Saratoga, Mitra Pinasthika Mustika (MPM), dan Golden Valley telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (*conditional sale purchase agreement/CSPA*) pada 6 Juli 2015.

“Kami sudah menetapkan untuk menjual 1,09 miliar saham Express. Lalu, pembagian saham tersebut diserahkan kepada pihak Saratoga, Mitra Pinasthika Mustika, dan Golden Valley,” imbuh Adam.

Belum ada penjelasan tentang harga penjualan saham taxi itu. Namun dalam kesempatan sebelumnya Adam menyebut harga penjualan saham merujuk pada harga rata-rata saham Express dalam 90 hari sebelum pengumuman rencana



jual beli. Namun banyak yang memperkirakan harga jual saham Express ke Saratoga bakal lebih tinggi dibanding harga rata-rata tersebut.

Pasca penuntasan transaksi jual beli, Saratoga akan menggelar penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) saham Express Transindo sebesar 49%. Hal ini mengacu pada Peraturan No IX.H.1 BEI tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Aksi bisnis Express sendiri tergolong cukup mumpuni. Perusahaan yang bersaing dengan Blue Bird ini telah menambah 1.950 unit armada baru, meliputi 1.000 unit taksi reguler, 500 unit armada taksi Eagle, 300 unit taksi premium, serta 150 bus Mercedes Benz untuk merek Eagle High. Dengan demikian, perseroan telah memiliki total

armada lebih dari 10.550 unit.

Rajawali Group yang dikomandani pengusaha kawakan Peter Sondakh memang kerap menjual perusahaan ketika sudah besar, dan membeli perusahaan yang sedang kesulitan.

Terakhir, Rajawali Group menjual 37 persen saham PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) kepada perusahaan asal Malaysia, Felda Global Ventures (FGV) Holdings Berhad. Penjualan ini bernilai USD680 juta atau setara Rp9,04 triliun terdiri atas gabungan dana tunai dan saham.

Rajawali Group kabarnya untung besar dari penjualan ini. Pasalnya, transaksi ini setara dengan harga Rp765 per saham atau 1,7 kali lebih tinggi dari harga penutupan saham BWPT di bursa pada tanggal 12 Juni 2015 senilai Rp450 per lembar.

Peter Sondakh adalah salah satu pendiri Grand Hyatt di Jakarta serta jaringan televisi swasta pertama di Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) di masa kejayaan Ore Baru. Namun saat ini Rajawali Group fokus pada tiga bidang usaha, yakni properti, pertambangan, dan perkebunan. /Moh Sahlan



## Harga Pangan Dunia Jatuh

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melaporkan, harga pangan dunia jatuh untuk ke-14 kalinya dalam 15 bulan. Bahkan ada kekhawatiran suhu tinggi dari fenomena El Nino akan mendorong harga biji-bijian dan sereal jatuh lebih dalam lagi.

Melansir laman Xinhua, Jumat (10/7), FAO memperkirakan produksi sereal tahun ini akan mencapai total 2,53 miliar metrik ton, turun 1,1 persen dibandingkan produksi tahun lalu, namun di atas perkiraan setahun penuh yang dirilis sebulan lalu.

Keseluruhan Indeks Harga Pangan FAO berdiri di 165,1 poin, 0,9 persen di bawah tingkat pada Mei. Terakhir kali indeks sangat

rendah adalah pada September 2009. Harga beras stabil meskipun terjadi sedikit kenaikan dalam permintaan, yang diserap oleh stok beras.

FAO mengatakan masalah di Afrika bisa memberikan tekanan pada harga ke depan karena cuaca buruk, konflik, dan ketidakstabilan politik, terutama dalam produksi sereal. Selain itu, fenomena cuaca yang berdampak rim (pinggiran) Pasifik atau El Nino juga bisa merugikan produksi di beberapa Negara.

Indeks FAO bulanan berikutnya, yang didasarkan pada sekeranjang 55 barang dan 73 kutipan harga dalam lima kelompok komoditas pangan utama, akan dirilis pada 6 Agustus. /Tri Harningsih



## 54 Proyek Investasi dalam Tahap Konstruksi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menyebut ada 54 proyek investasi dalam tahap konstruksi. Investasi ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian Indonesia yang sedang menurun.

Franky mengatakan, investasi yang tengah digarap ini dapat menggerakkan ekonomi Indonesia lantaran akan ada tambahan ekspor setelah selesainya konstruksi dan memasuki tahap produksi komersial, penghematan devisa dari penurunan nilai impor, penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung, serta listrik yang dapat dihasilkan.

“Kami (BKPM) akan menekankan tiga hal untuk menggerakkan ekonomi Indonesia di masa mendatang, yaitu investasi, industrialisasi, dan peningkatan ekspor. Dampak ekonomi dari 54 proyek yang sedang tahap konstruksi ini menunjukkan ketiga instrumen tersebut dapat diwujudkan melalui lancarnya proses realisasi investasi yang masuk,” ujar Franky di kantor BKPM Jakarta, Jumat (10/7).

Lebih lanjut dikatakan dia, dampak ekonomi yang dihasilkan dari 54 proyek investasi tersebut, yaitu adanya ekspor USD3,33 miliar per tahun. Dia menjelaskan, dari ke-54 proyek ada dua proyek yang sudah memasuki tahap produksi komersial dan berkontribusi terhadap

penambahan ekspor Indonesia USD533,1 juta per tahun.

Sementara itu, 52 proyek lainnya yang masih dalam tahap konstruksi, dengan potensi ekspor USD 2,78 miliar per tahun. Selain ekspor, juga terdapat potensi penghematan devisa dari penurunan impor senilai USD1,15 miliar per tahun, masing-masing dari sektor petrokimia USD744 juta, bahan baku benang USD69 juta dan industri baja USD343,2 juta.

“Dampak ekonomi lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah adanya penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 43.444 orang. Dengan asumsi adanya *multiplier effect* empat kali lipat, berarti tercipta sekitar 160 ribu tenaga kerja tidak langsung dari proyek investasi tersebut,” jelas Franky.

Dari dua proyek investasi yang sudah memasuki tahap produksi komersial, lanjut dia, sudah terserap sebanyak 9.280 tenaga kerja langsung dan sekitar 36 ribu tenaga kerja tidak langsung.

Selain itu, terdapat beberapa proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 3.748,7 MW. Berdasarkan pemantauan BKPM, terdapat pembangkit listrik dengan kapasitas 130 MW yang sudah menyelesaikan konstruksinya.

“Dari proyek pembangkit listrik yang dipantau ini, 850,7 MW akan digunakan untuk kepentingan sendiri oleh perusahaan, sisanya dijual ke PLN,” pungkasnya. /Moh Sahlan

## Audit Penggunaan Komponen Dalam Negeri

Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat membangun kerjasama untuk melakukan audit terhadap kewajiban memakai komponen dalam negeri dalam kegiatan industri. Kesepakatan ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding* tentang Pengawasan Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Program penggunaan komponen dalam negeri akan naik level, yaitu penegakan aturan atau *law enforcement*. Bukan sekedar imbauan lagi,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai menandatangani MoU yang disaksikan Wapres RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/7).

Audit program P3DN ini secara khusus akan menyoar instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 dan No. 03 Tahun 2014.

Pengawasan terhadap penggunaan komponen dalam negeri diyakini akan mendorong geliat industri dalam negeri. Maklum, saat ini terjadi pelambatan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor produk industri. Data menunjukkan, pada periode Januari-Maret 2015, ekspor produk industri sebesar USD 33,43 miliar atau turun dari periode yang sama tahun 2014 sebesar 8,23% dengan memberikan kontribusi terhadap total ekspor nasional sebesar 85,43%. /Moh Sahlan

# Indonesia dan Krisis Keuangan Global

**C**ukup mengejutkan. Banyak analis dan pemerhati industri keuangan global menyatakan bahwa krisis keuangan global akan terjadi pada bulan September 2015. Jauh lebih dahsyat daripada tahun krisis 2008 lalu.

Apa dasar prediksi mereka? Mereka melihat dalam waktu dekat, krisis di industri keuangan Uni Eropa, AS dan Tiongkok akan meledak. Di Eropa, pemicunya adalah krisis keuangan (*debt crisis*) di Yunani. Jika krisis utang (*debt crisis*) Yunani tak terselesaikan maka krisis ini akan merembet ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dalam kacamata geopolitik, krisis hutang Yunani bisa menghancurkan mata uang Euro. Akibatnya, besar kemungkinan, beberapa negara bisa keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Di AS, Ron Paul (mantan kandidat Presiden AS dari partai Republik) mengatakan kepada CNBC beberapa saat lalu bahwa kebijakan 'easy money' yang dikeluarkan FED membuat pasar saham di AS menuju jurang kehancuran. Menurut Ron, *financial bubble* yang terjadi saat ini adalah penyebab utamanya. *Financial bubble* ini juga yang menyebabkan krisis keuangan global pada tahun 2008 lalu.

Chairman and Chief Executive Officer JP Morgan Chase James Dimon dalam surat kepada *shareholder*-nya (*shareholder letter*) pada 8 April 2015 lalu secara eksplisit menyatakan hal serupa. Dia menulis seperti ini: "Some things never change – there will be another crisis, and its impact will be felt by the financial market."

Kemudian dia menjelaskan



beberapa akar permasalahan dari krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya. "The trigger to the next crisis will not be the same as the trigger to the last one – but there will be another crisis. Triggering events could be geopolitical (the 1973 Middle East crisis), a recession where the Fed rapidly increases interest rates (the 1980-1982 recession), a commodities price collapse (oil in the late 1980s), the commercial real estate crisis (in the early 1990s), the Asian crisis (in 1997), so-called "bubbles" (the 2000 Internet bubble and the 2008 mortgage/housing bubble), etc. While the past crises had different roots (you could spend a lot of time arguing the degree to which geopolitical, economic or purely financial factors caused each crisis), they generally had a strong effect across the financial markets," tambahnya.

Meski tidak menyebutkan secara khusus soal krisis utang Yunani, setidaknya analis dan pemain di pasar modal mahfum ketika dia menyentil soal krisis di Yunani dalam surat itu: "Regarding the Eurozone, we must be prepared for a potential exit by Greece."

## Apa yang sebenarnya terjadi di Yunani?

Yang perlu dipahami oleh kita untuk menjawab pertanyaan itu adalah:

Seorang pensiunan memegang tiket saat menunggu sebagian uang pensiunannya di Bank Nasional cabang Athena, Yunani, Senin (6/7).

Kanan: Alexis Tsipras

Mengapa krisis Yunani tetap berlanjut (bahkan lebih dalam lagi) meski *bailout* miliaran Dollar untuk menstabilisasi perekonomian (termasuk industri keuangan) Yunani sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu?

Jawabannya sederhana, ternyata sebagian besar dana *bailout* itu (yang katanya untuk membantu merestrukturisasi dan memperbaiki perekonomian Yunani) digunakan untuk membayar utang-utang luar negeri Yunani. Bukan untuk mendorong pertumbuhan di sektor riil.

Layak kalau Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mengatakan bahwa beberapa kebijakan restrukturisasi yang "dipaksakan" oleh IMF sudah menyebabkan *humanitarian crisis* di Yunani.

Bagaimana tidak, menurut Tsipras, lembaga-lembaga kreditor terus menekannya untuk segera memotong pembayaran uang pensiun sebagian besar rakyat Yunani untuk membayar utang-utang luar negerinya. Ini sudah sangat keterlaluan. "We are shouldering the dignity of our people,

as well as the hopes of the people of Europe... We cannot ignore this responsibility. This is not a matter of ideological stubbornness. This is about democracy,” katanya ketika menjelaskan alasannya untuk menolak pemotongan uang pensiun rakyatnya.

Cukup sederhana sebenarnya alasan Tsipras itu, bahwa rakyatnya jangan jadi korban akibat dipaksa untuk ikut menalangi seluruh utang-utang Yunani.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Tsipras cukup berani kali ini untuk melawan tekanan itu?

Ternyata bulan Juni lalu Tsipras telah menandatangani sebuah perjanjian penting dengan Russia. Yunani sepakat untuk membangun terminal pipa gas (jaringan pipa TurkStream) milik Russia di Eropa. Kesepakatan penting ini sangat penting bagi Russia untuk mengalihkan pembangunan pipa gas Russia ke Eropa yang dulu direncanakan melewati Ukraina. Semua mahfum bahwa AS dan Nato mengganjal rencana pembangunan pipa tersebut dengan mendestabilisasi Ukraina.

Bagi Yunani, mungkin Russia tidak bisa memberi bantuan finansial yang cukup signifikan untuk keluar dari krisis. Namun, hal penting dari kerjasama ini adalah aspek ketahanan energi Yunani akibat krisis yang berkepanjangan bisa terkendali.

Yang menarik justru tawaran dari China buat Yunani untuk keluar dari krisis. Beberapa saat lalu Direktur The Quantitative Finance Department di China's Institute of Quantitative and Technical Economics, Fan Mingtao dalam sebuah pernyataannya di *sputniknews.com* mengatakan seperti ini, “*The Greek crisis has an undoubtedly seriously influence on China's trade with Greece and investment into the country. But I think that European countries together with China can help Greece overcome the problems that arose,*” katanya.

Kemudian dia menambahkan “I

*believe there are two ways to give Greece Chinese aid. First, within the framework of the international aid through EU countries. Second, China could aid Greece directly. Especially considering the Silk Road Economic Belt and the Asian Infrastructure Investment Bank. China has this ability,*” tegasnya.

Tiongkok sebenarnya ingin menyatakan bahwa Tiongkok punya kekuatan untuk membantu secara finansial Yunani dalam kerangka besar strategi geopolitik *Silk Road Economic Belt* dan memperkuat kedudukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) disamping World Bank dan IMF.

Entah, apakah dua hal tersebut (faktor Russia dan China) akan menjadi pegangan Tsipras untuk lepas dari tekanan AS, IMF dan Bank Sentral Uni Eropa. Namun satu hal yang jangan pernah dilupakan bahwa Tsipras tidak ingin perusahaan finansial global yang ada dibalik krisis Yunani ini mengatur negaranya.

Bahkan dengan percaya diri dia mengatakan bahwa Yunani kini sedang melangkah ke masa depan baru. Referendum yang dia putuskan untuk memutuskan apakah menolak atau mengikuti kemauan kreditur sebagai ‘*Celebration of Democracy*’. “*Not only will we remain in Europe, but we will live with dignity to prosper, to work as equals among equals*”, tegas Tsipras.

Pertanyaan berikutnya, apakah bantuan China dan Russia tersebut mampu membuat Yunani keluar dari krisis?

Jawabannya belum tentu. Harus diingat, walaupun hasil referendum menyatakan menolak proposal kreditur toh hal ini mengakibatkan mata uang Euro tetap akan jatuh. Dan ini akan membuat efek domino yang mempercepat krisis keuangan global.

Seperti yang terjadi pada 2008 lalu.

Namun, yang perlu diingat, dan ini adalah fakta yang mencengangkan. Ada sekitar 1400-an bank yang ada di dunia ini secara perlahan bangkrut pascakrisis keuangan global tahun

2008 lalu. Ada juga yang bertahan setelah memilih merger. Tapi krisis tersebut adalah surga bagi 6 bank besar di Amerika Serikat. Jadi, yang paling diuntungkan dari krisis keuangan global 2008 saat itu adalah bank dan lembaga keuangan global besar.

Laporan *LA Times* September 2013 lalu menyatakan seperti ini: “*Just before the financial crisis hit (krisis keuangan tahun 2008.red), Wells Fargo & Co. had \$609 billion in assets. Now it has \$1.4 trillion. Bank of America Corp. had \$1.7 trillion in assets. That's up to \$2.1 trillion. And the assets of JPMorgan Chase & Co., the nation's biggest bank, have ballooned to \$2.4 trillion from \$1.8 trillion*”. Itu belum catatan bank besar lainnya.

Hal yang sama juga bisa terjadi jika krisis keuangan global terjadi pada 2015 ini. Bank-bank besar di AS itu mungkin bisa bertambah besar lagi. Asetnya bertambah, bahkan profitnya bertambah. Yang besar makin besar, yang kaya makin kaya.

#### **Lalu, Apa Konsekuensi Geopolitiknya?**

Sederhana, dengan bertambahnya aset dan jumlah uang yang sangat banyak itu, bank dan lembaga keuangan tersebut akan bisa mengontrol apapun. Bahkan mengontrol sebuah negara, seperti Yunani. Bahkan Indonesia.

Dengan menggunakan tangan IMF, World Bank, AIIB, NIB atau lembaga-lembaga donor lain mereka akan bisa “memaksa” kehendaknya. Suka atau tidak suka.

Ini seyogyanya yang menjadi ‘catatan lain’ buat pemerintahan Jokowi untuk membuat kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan krisis keuangan global yang konon katanya akan dimulai pada September 2015 ini.

Jangan sampai Indonesia terjebak seperti Yunani yang dipaksa untuk memotong dana pensiun buat rakyatnya. Atau (kalau di Indonesia) pemerintah akan memotong uang Jaminan Hari Tua (JHT) rakyatnya untuk meredam krisis misalnya.

Mudah-mudahan ini tidak terjadi.... © Faizal Rizki Arief



# Revisi PP 41/1996, Pintu Masuk Menuju Kolonialisme Ekonomi

**S**oal penguasaan lahan tanah dan properti, jangan dianggap enteng. Karena dalam skema ekonomi para Taipan dan pelaku bisnis asing, hal itu merupakan tahapan awal untuk menanam pengaruh di wilayah-wilayah yang punya nilai strategis secara geopolitik di Indonesia. Cerita seputar pemberian izin Gubernur Ahok kepada anak perusahaan Podomoro terkait reklamasi pulau di Teluk Jakarta, maupun manuver para taipan dalam penguasaan lahan tanah di Madura pada era Suharto, bukan saja bakal mengakibatkan bencana ekonomi, tapi juga bencana geopolitik.

Kalau Presiden Jokowi benar-benar akan merevisi PP 41/1996 yang memungkinkan WNA memiliki aset di Indonesia, maka sempurnalah pihak asing dalam mewujudkan dua dari tiga sasaran pokok perang asimetris untuk menguasai wilayah tanah air kita secara geopolitik. Yaitu, membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme dan kapitalisme global. Dan melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat dan elit pimpinan nasional.

Pada tahap awal, memang sekadar memberi izin kepada pelaku bisnis asing untuk memiliki properti. Namun pada perkembangannya kemudian, pihak asing akan diperbolehkan untuk memiliki tanah. Lantas, pada tahapan yang lebih strategis, pemerintah akan memberi izin kepemilikan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Sehingga ketika kemudian terjadi sengketa

*Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (22/6).*



perbatasan seperti dalam kasus Sipadan dan Ligitan, maka potensi hilangnya pulau-pulau tersebut ketika terjadi sengketa sangatlah besar. Maka, bukan saja terjadi bencana ekonomi, melainkan juga bakal terjadi bencana geopolitik.

Itulah sebabnya berbagai kalangan masyarakat jadi gusar dengan sepak-terjang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi izin Proyek Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro, yaitu PT Muara Wisesa Samudera.

Sebagaimana kegusaran berbagai kalangan terhadap kebijakan Ahok memberikan izin untuk Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, langkah ini pada perkembangannya akan dijadikan “pintu masuk” untuk membangun 17 pulau buatan, sebagai landasan untuk mengembangkan sebuah mega proyek yang bernama *Giant Sea Wall*.

Kekhawatiran kian merebak ketika mega proyek mengindikasikan adanya keterlibatan para Taipan yang dikenal dengan julukan “9 Naga” untuk menguasai kawasan Jakarta dan sekitarnya secara geopolitik. Titik krusialnya bukan pada izin Proyek Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta, tapi terletak pada kenyataan adanya mega proyek *Giant Sea Wall* yang nampaknya akan memanfaatkan Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta dengan adanya rencana membangun 17 pulau buatan. Karena pembangunan 17 pulau buatan inilah yang kemudian dijadikan landasan untuk mengembangkan sebuah mega proyek yang bernama *Giant Sea Wall*.

Mencermati hal ini, nampaknya rencana Pemerintah Jokowi-JK untuk memberikan ijin kepada asing untuk memiliki properti di Indonesia melalui Revisi PP No r 41/1996 tentang Hak Pakai Properti oleh Warga Negara Asing (WNA), dimana orang-orang asing akan diberi kelonggaran untuk memiliki properti di Indonesia, nampaknya ada tali-temali dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Ahok merestui mega proyek *Giant Sea Wall* dan Reklamasi

Pulau di Teluk Jakarta.

### **Hasrat Para Taipan Untuk Kuasai Lahan Tanah di Nusantara**

Ihwal hasrat para taipan (Tionghoa) untuk menguasai lahan tanah, boleh dikata erat kaitannya dengan hasrat untuk menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah yang punya nilai strategis secara geopolitik. Mari kita kilas balik sejenak, bagaimana para Taipan berebut pengaruh di pulau Madura, Jawa Timur.

Selintas Madura seakan merupakan pulau kering kerontang berikut hamparan lahan yang tak subur. Namun di mata seorang taipan bernama Liem Soe Liong, Madura justru dipandang sebagai harta karun yang belum diolah menjadi aset kekayaan yang cukup besar.

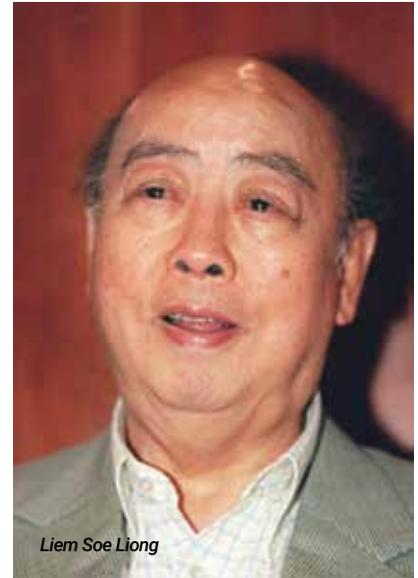
Maka pada 1983, dengan dipayungi oleh Surat Izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMP) tertanggal 31 Desember 1983, Liem Soe Liong atau yang kelak bernama Indonesia Sudono Salim, mulai mengibarkan bendera PT Perkasa Krida Hasta Indonesia Cement Enterprise (PKHICE).

Melalui PKHICE inilah, Liem sang penguasa Salim Group ini mulai menjalankan skema utamanya: Mengeduk Kekayaan Madura Lewat Sebuah Pabrik Semen.

Dalam kongsi bisnis ini, Liem bermitra dengan Ibrahim Risyad, Bimantara dan Mitrao. Proyek ini kabarnya menelan biaya Rp 600 miliar. Untuk kondisi perekonomian Indonesia ketika satu dolar AS masih sebesar Rp 2000, jumlah segitu aduhai besarnya.

Madura nampaknya memang sudah diincar jauh-jauh hari oleh para taipan semacam Liem dan para kroni Tionghoa lainnya. PKHICE Namun Liem baru mendapatkan momentumnya ketika Semen Gresik yang mulanya pada 1981-1982 bermaksud memperluas pabriknya di kawasan Madura, kemudian dengan berbagai pertimbangan, mundur teratur.

Padaحال Profesor Wijoyo



Liem Soe Liong

Nitisastro, Menko Ekonomi era Pa Harto, yang dikenal sebagai tangan-tangan IMF dan World Bank di Indonesia sehingga disebut Mafia Berkeley, ikut mendukung proyek pengembangan Semen Gresik di Madura.

Apapun alasannya, kemudian mundurnya Semen Gresik inilah yang membuka pintu masuk bagi Liem untuk mengambil-alih peran yang dimainkan Semen Gresik sebelumnya.

Dengan kata lain, Liem sesungguhnya sedang melakukan tipu daya dan manipulasi kepada masyarakat dengan membongceng Semen Gresik sebagai proyek pemerintah. Karena proyek yang digarap PKHICE dipandang sebagai perluasan dan pengembangan dari Semen Gresik, maka masyarakat Madura tahunya ini merupakan proyeknya pemerintahan Suharto pada waktu itu.

Padaحال, secara *de facto* Liem sudah mula menanamkan benih-benih penjajahan ekonominya di Madura. Liem membeli 492 hektar dari 692 hektar lahan milik Semen Gresik, seharga Rp 500 juta.

Soal kepemilikan lahan ini, Semen Gresik yang membeli 692 hektar lahan dari masyarakat Madura seharga Rp 2000 per meter, meski kenyataannya penduduk hanya



menerima Rp 400 per meter. Namun masyarakat *toh* menerima saja hal itu, karena dalam bayangannya itu kan proyeknya pemerintahan Suharto.

*Lha* ketika kemudian terungkap ternyata lahan sudah beralih ke tangan Liem, tentu saja masyarakat merasa kena tipu daya dan dimanipulasi. Lebih celaknya lagi, pabrik semen milik Salim Group ini juga tak kunjung terwujud padahal BPKPM sudah mengeluarkan izin yang masa berlakunya hingga 1986.

Pabrik Semen yang menjadi dasar keluarnya izin pemerintah itu tak terwujud, tapi lahan Salim Group justru malah semakin mengembang menjadi 700 hektar, setidaknya di 3 kecamatan: Kamal, Socah dan Labang, di Kabupaten Bangkalan.

Liem memang sepenuh hati untuk menjajah Madura, khususnya dalam penguasaan lahan. Lahan sebesar itu dibebaskan oleh operator-operator bisnisnya Liem lewat bahan tangan dengan harga Rp 200 sampai Rp 1000 per meter. Menyedihkan bukan?

Apalagi Liem mematok pembelian lahan seharga itu dengan merujuk pada SK Bupati Bangkalan 1983 tentang patokan harga tanah untuk kepentingan pemerintah dan BUMN.

Di sinilah liciknya Liem. Tapi jangan lupa, Liem bukan satu-satunya taipan yang ikut bermain di



Warga beraktivitas di sekitar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/6).

Madura. Belakangan ikut nimbrung William Suryajaya dan anaknya Edward yang berbendera Summa Group. Hebatnya lagi, Om Willem mendapat dukungan mantan Gubernur Jawa Timur Mohammad Noer. Begitu masuk ke Madura, Summa Group segera mengibarkan bendera PT Dhipa Madura Pradana (DMP).

Di DMP, Summa menguasai saham mayoritas. Maka dimulailah gagasan besar grup Summa yaitu, yang diimpikan masyarakat Madura: Membangun Jembatan Yang Menghubungkan Madura dan

Surabaya. Sebuah gagasan yang cocok dengan konsepsi Presiden Suharto yang berkeinginan menghubungkan Jawa-Madura, Jawa-Bali dan Jawa-Sumatera.

Bedanya dengan Liem yang sepenuhnya Tiongkok *oriented* dan berkongsi dengan keluarga Suharto, Willem dan Summa Group nampaknya memperluas mitra usahanya dengan menggandeng Jepang dengan mempresentasikan gagasan jembatan itu di Japan-Indonesia Science and Technology (JIF). JIF ini merupakan forum kerjasama Indonesia-Jepang yang waktu itu diketuai oleh Prof DR BJ Habibie.

Gagasan Summa Group ini mendapat dukungan dari sejumlah



pengusaha besar Jepang antara lain C Itoh, Mitsubishi, Shimizu dan Long Term Credit Bank of Tokyo.

Alhasil, pada 20 November 1990, DMP dan para taipan Jepang menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* di Tokyo, untuk pembangunjan proyek jembatan sepanjang 3 km, lebar 21 m dengan 6 jalur kendaraan.

Dari cerita ini, selain Tiongkok, Jepang pun punya maksud terselubung di Madura. Melalui momentum bantuan pembangunan jembatan ini, para pebisnis Jepang berkeinginan untuk menjadikan Madura sebagai kawasan Industri dan *real estate*. Tentu saja industri yang jadi prioritas adalah industri elektronik.

Besar kemungkinan, pertarungan terselubung antara skema Salim Group dan Summa inilah, yang membuat rencana Liem dengan pabrik semennya jadi macet. Jepang yang bermaksud menjadikan Madura sebagai kawasan industri, mensyaratkan kawasan ini harus bebas polusi. Sedangkan pabrik semennya Liem justru menciptakan biang polusi.

Alhasil, Jepang dan Summa Group kemudian mendesak agar mengusir skema bisnis Liem untuk mendirikan pabrik semen di Madura. Dan mengusulkan agar pabrik semen Liem dipindah lokasinya ke Tuban. Tentu saja Liem menolak.

Selain Liem sudah keluar uang banyak, rupanya Liem juga sudah membangun dan mendirikan Universitas Bangkalan yang menelan miliaran rupiah. Bahkan laboratorium pertanian lahan keringnya, kabarnya yang paling canggih di Asia Tenggara pada waktu itu.

Melalui universitas inilah, Liem mencoba mengambil hati orang-orang Madura. Tentunya dengan mengeluarkan miliaran rupiah sebagai ongkos sosial.

Dari skup sekecil Madura ini saja, sudah tergambar perang bisnis Tiongkok versus Jepang. Gara-gara Liem tak rela mundur begitu saja dari Madura setelah keluar uang miliaran rupiah, kemudian sempat ada upaya lobi dari pihak Liem, atau mungkin kalangan yang mendukung skema bisnis Liem di Madura, untuk membujuk Jepang agar membatalkan rencana membangun industri elektronik di Madura. Bahkan waktu itu ada desakan agar Jepang membatalkan dukungan dana buat DMP.

Hanya saja Tiongkok mungkin percaya dengan yang namanya hoki. Ketika dalam pertarungan tingkat tinggi dengan pihak Summa Liem mulai kalah satu set dan mulai sempoyongan, tiba-tiba Willem Suryajaya dan Summa Group kena musibah, tertimpa kesulitan likuiditas gara-gara Bank Summa bangkrut. Yang kemudian berakibat reputasi Willem dan Summa juga hancur.

Situasi ini, membuat Liem dengan skema bisnisnya di Madura, kembali mendapat angin.

Pada 17 Mei 1991, Rapat Tim Pengarah Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura menjatuhkan akta putus. Liem boleh meneruskan rencananya membangun pabrik semennya. Meski kemudian tak pernah jadi kenyataan. Sedangkan rencana pembangunan jembatan pun terkatung-katung, karena dengan kejadian ini, pihak Jepang jadi tidak semangat lagi membantu skema bisnisnya Willem dan Summa. Apalagi ketika keputusan Rapat Tim Pengarah justru menguntungkan skema bisnisnya Liem dan Salim Group.

Apalagi ketika kemudian gara-gara ambruknya Bank Summa, William yang sekaligus penguasaha pemilik Astra, terpaksa menjual semua sahamnya di Astra kepada beberapa konglomerat, termasuk Liem, pesaing Willem dalam perang bisnis di Madura. Untuk menutup utang Astra.

Sekelumit kisah ini, menggambarkan betapa Madura sejak periode 1980an sudah menjadi sasaran arena pertarungan antar taipan, dan bahkan antar negara-negara asing. Sehingga akan menjadi sasaran serbuan pemilik modal baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara geografis, Madura saat ini memang tak terhindarkan lagi sebagai kawasan industri di Jawa Timur yang dipandang strategis, yang berarti akan membawa dampak ekonomi maupun budaya. Selain itu, perairan di sekitar Madura juga memendam potensi minyak dan gas alam yang cukup besar. Hingga kini, sudah puluhan perusahaan yang mengebor minyak di lepas pantai Madura.

Mengingat nilai strategis Madura secara geopolitik, kiranya perlu reposisi target-target industrialisasi di Madura. Sehingga siapa-siapa saja investor yang mau masuk, dan bagaimana skema bisnisnya, harus menjadi isu strategis yang jadi bahan pembahasan berbagai elemen strategis bangsa. © Hendrajit

ISIS mengancam akan menaklukkan wilayah Jalur Gaza, Palestina. Alasannya, Hamas yang berkuasa di sana dianggap bersikap lunak pada Israel, dan tidak serius menerapkan "syariat Islam."

**P**erilaku kelompok militan Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) semakin membingungkan. Atau lebih tepat dikatakan, tidak ada orientasi yang jelas tentang "misi keislaman" seperti apa persisnya yang diperjuangkan kelompok ekstrem itu. Padahal ISIS sudah berhasil menguasai wilayah yang sangat luas di Irak dan Suriah, dan sudah mendeklarasikan diri sebagai negara atau "kekhalifahan Islam."

Makin kaburnya "misi keislaman" ISIS terlihat dari konfrontasinya dengan faksi Islam Palestina, Hamas, yang sudah puluhan tahun terbukti berjuang melawan penjajahan Israel. Pada 1 Juli 2015, ISIS melontarkan peringatan keras terhadap Hamas, faksi Islam Palestina yang berkuasa di wilayah Jalur Gaza, daerah Palestina yang diisolasi Israel.

ISIS menyiarkan video yang direkam di Suriah dan ditujukan pada "tiran Hamas." Dalam video itu, seorang anggota ISIS yang bertopeng mengatakan, "Kami akan menumbangkan Negara Yahudi (Israel), dan kamu (Hamas) dan (faksi nasionalis Palestina) Fatah, dan semua kaum sekuler tidak berarti apa-apa, dan kamu akan dilindas oleh (pasukan) kami yang mendekat."

ISIS mengatakan, aturan syariat Islam akan diterapkan di Gaza, dan menjanjikan bahwa apa yang terjadi di Suriah saat ini, khususnya di kamp pengungsi Yarmouk, akan terjadi juga di Gaza. Pasukan ISIS pada April 2015 menyerbu kamp pengungsi Palestina di Yarmouk, pinggiran Damascus, dan menancapkan kakinya untuk pertama kali di ibukota Suriah itu. Di kawasan itu bermukim 160.000 warga Palestina dan Suriah. Para pejabat Palestina dan Suriah sudah bertekad untuk merebut kembali Yarmouk.



## Ketika ISIS Menantang Hamas

### ISIS Sebagai Musuh Bersama

Seperti juga ISIS, Hamas memusuhi negara Zionis Israel, yang didirikan di atas tanah Palestina. Namun tidak seperti ISIS, Hamas tidak berniat mendirikan kekhalifahan Islam di Timur Tengah dan tidak melancarkan "jihad berskala global." Hamas lebih membatasi perjuangannya pada kemerdekaan rakyat Palestina.

Oleh pihak intelijen Israel, Hamas dituduh memiliki kaitan dengan ISIS di semenanjung Sinai, Mesir, dalam hal penyelundupan senjata dan serangan teror. Padahal, Hamas justru sedang berseteru dengan ISIS. Tuduhan Israel itu sudah dibantah keras oleh Hamas.

Sejumlah analisis meyakini, ancaman yang dilontarkan ISIS bisa mendekatkan hubungan Israel dan Hamas, karena adanya ISIS sebagai musuh bersama, meski Hamas dan Israel pada hakikatnya tetap berada

pada kubu yang bertentangan. Pendekatan Hamas-Israel ini berpotensi mewujudkan kesepakatan gencatan senjata lima-tahun, yang akan memungkinkan Hamas membuka pelabuhan laut di Jalur Gaza dan mengakhiri blokade laut yang diterapkan oleh militer Israel.

"(Hamas) adalah gerakan yang telah menjadi sebuah rezim, dan ketika Anda menjadi sebuah rezim maka Anda dapat menderita sebagai akibat genggaman Anda pada kekuasaan. Hal inilah yang sekarang mereka pelajari. Jadi mereka sedang mencari opsi-opsi," ujar Haim Tomer, mantan ketua operasi luar negeri Mossad, dinas intelijen Israel.

Sedangkan juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan, Hamas telah menerima "ide-ide" namun belum ada usulan konkret tentang kemungkinan gencatan senjata. "Kami akan menangani setiap upaya, yang akan menjerus ke berhentinya



Sebuah gambar dari video pernyataan yang dirilis Isis ditujukan kepada 'tiran Hamas'

blokade dan mengurangi penderitaan rakyat Gaza, dengan syarat hal itu tidak mempengaruhi perjuangan nasional kami," lanjutnya.

Kehadiran kelompok Salafi pro-ISIS di dalam wilayah Gaza memang telah merepotkan dan membuat marah Hamas. Hal itu karena kelompok ini tidak mau tunduk pada aturan Hamas, dan berbuat semauanya sendiri tanpa memikirkan dampaknya pada Hamas. Kelompok ini juga menentang rekonsiliasi Hamas dengan faksi nasionalis Fatah dan gagasan gencatan senjata Hamas-Israel.

Brigade Omar, kelompok Salafi yang loyal pada ISIS, telah melancarkan tiga serangan roket dari Jalur Gaza ke Israel pada Juni 2015. Tindakan ini bertujuan memprovokasi Israel dan mempermalukan Hamas. Hamas membantah keterlibatan pada serangan roket itu. Israel pun bereaksi dengan melancarkan beberapa serangan udara ke Gaza, meski militer Israel tampaknya sengaja menyerang bangunan dan fasilitas yang tidak lagi digunakan Hamas, agar tidak membuat situasi makin panas.

**Membunuh komandan Hamas**  
ISIS pada Juni 2015 telah

mengancam Hamas, agar "mengakhiri perangnya terhadap agama" di perbatasan Israel dari Gaza, atau akan "menghadapi konsekuensi-konsekuensinya." Ultimatum ini muncul hanya satu hari setelah ISIS mengklaim bertanggungjawab atas terbunuhnya Saber Siam, seorang komandan Hamas di Jalur Gaza. Menurut laporan setempat, militan ISIS memasang bom di kendaraan Saber Siam dan meledakkannya.

Hamas, yang memimpin Gaza sejak 2007, memandang kelompok-kelompok ekstrem Islam itu sebagai ancaman. Terlebih sesudah pengambilalihan paksa oleh ISIS atas kamp pengungsi Palestina di Yarmouk, dekat Damascus. Maka Hamas pun menindak dan menangkap puluhan pendukung ISIS dalam beberapa minggu terakhir, termasuk para imam masjid. Sebaliknya ISIS menuduh Hamas sebagai pelaku "bid'ah," yang telah bersikap lunak terhadap Israel dan gagal menerapkan hukum Islam di Gaza.

Hamas yang masih dalam proses memulihkan diri dari pertempuran hidup-mati melawan agresi Israel tahun 2014, kini menemukan musuh internal baru di Gaza, yakni kelompok pendukung ISIS. Kelompok Salafi ini tidak cukup kuat untuk menggulingkan kekuasaan Hamas, namun ulah mereka cukup menyulitkan Hamas. Hamas menuduh mereka sebagai pelaku sejumlah ledakan misterius yang ditujukan pada pos-pos keamanan Hamas, serta sejumlah peluncuran roket ke wilayah Israel.

Tindakan Hamas terhadap kelompok ini, yang sempat menewaskan seorang buronan pro-ISIS awal Juni 2015, tampaknya telah menghilangkan peluang untuk rekonsiliasi di antara keduanya. Buronan itu, Younis al-Hunnor, sudah kabur selama berbulan-bulan dan kematiannya menimbulkan kemarahan ISIS yang menyerukan aksi balasan. "Hamas adalah kafir," demikian tulisan yang dibuat dengan cat semprot di anak tangga bangunan

apartemen al-Hunnor di Gaza selatan.

### **Khotbah-khotbah anti-Hamas**

Hamas umumnya bersikap toleran terhadap kelompok Salafi, sejak kelompok ini muncul di Gaza satu dasawarsa yang lalu, walaupun terkadang terjadi konfrontasi di antara keduanya. Kelompok-kelompok ultrakonservatif ini ingin mengubah Gaza menjadi kekhalifahan Islam. Pada 2009, Hamas menewaskan seorang pemimpin Salafi, yang mendeklarasikan sebuah emirat Islam di kota bagian selatan Gaza, Rafah.

Sejak itu, Hamas dengan diam-diam berusaha membubarkan kelompok-kelompok semacam ini. "Kini mereka menjadi kelompok yang terserak-serak, kadang-kadang terdiri dari sampai 10 orang yang memiliki problem ideologis dengan Hamas. Mereka tidak bisa menemukan seorang inkubator populer untuk meredam aktivitas mereka di Gaza," ujar Adnan Abu Amer, analis politik dari Gaza.

Namun dalam bulan-bulan terakhir, kaum Salafi di Gaza telah merasa diperkuat dengan kebangkitan kelompok ISIS, yang mendeklarasikan kekhalifahan di wilayah luas yang telah dikuasainya. Pada waktu yang sama, posisi Hamas telah diperlemah oleh agresi Israel tahun lalu, sedangkan blokade yang diterapkan di perbatasan Gaza oleh Israel dan Mesir terasa terus mempersulit kehidupan warga Gaza.

Menurut para analis, ada sekitar 1.000 loyalis Salafi di Gaza. Ini jumlah yang terlalu kecil untuk mengancam Hamas, namun cukup besar untuk terus-menerus menimbulkan problem. Khotbah-khotbah kaum Salafi ini di masjid-masjid Gaza bersifat anti-Hamas. Para pejuang Salafi ini juga mengklaim bertanggungjawab atas beberapa serangan roket ke Israel. Serangan itu tidak menimbulkan korban di pihak Israel, namun mengganggu gencatan senjata Hamas-Israel yang sudah berlangsung 10 bulan. © Satrio Arismanandar

# “Ramadhan Berdarah” di Timur Tengah

Tiga aksi teror di bulan suci Ramadhan menunjukkan pola kekerasan yang sedang berkembang. Jika pun tidak terlibat langsung, ISIS dan gaya brutalitasnya seolah sudah menjadi sumber inspirasi bagi teroris.

**R**amadhan, bulan suci bagi umat Islam yang seharusnya diisi dengan puasa, ibadah, dan pendekatan diri pada Allah SWT, ternyata justru dinodai oleh aksi teror di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Timur Tengah. Jumat, 26 Juni 2015, secara mengejutkan terjadi serangan teror pada saat hampir bersamaan di Perancis, Kuwait, dan Tunisia.

Sebuah serangan bom bunuh diri menewaskan sedikitnya 28 jamaah dan melukai lebih dari 200 lainnya di Masjid Imam Al-Sadiq, masjid penganut Muslim Syiah, di kawasan al-Sawaber, kota Kuwait. Serangan fatal itu terjadi saat ibadah shalat Jumat. Saksi mata mengatakan, saat pemboman terjadi, masjid sedang dipenuhi sekitar 2.000 jamaah. Sejumlah besar tersangka segera ditangkap, termasuk pemilik kendaraan yang sempat dipakai oleh pelaku bom bunuh diri.

Sementara itu, serangan teroris terjadi di Hotel Riu Imperial Marhaba, di kawasan wisata Port El Kantaoui, kota pantai Sousse, Tunisia. Serangan oleh seorang pria bersenjata ini menewaskan 38 turis, mayoritas turis asing asal Inggris, dan melukai 39 korban lainnya. Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, pemimpin pemerintahan pertama hasil pemilu sesudah Revolusi Musim Semi Arab, memberlakukan keadaan darurat setelah terjadinya aksi teror ini.

Pelaku, yang diklaim bernama Abu Yahya al-Qayrawani (20), adalah mahasiswa yang menyamar sebagai turis dan masuk dari arah pantai ke tempat para turis berkumpul. Ia menyembunyikan

senjatanya dalam payung pantai, sebelum mengeluarkannya dan lalu menembak dengan membabi-buta. Perdana Menteri Tunisia Habib Essid segera mengerahkan tentara untuk mengamankan lokasi-lokasi wisata dan situs arkeologi. Tunisia juga akan menutup sedikitnya 80 masjid yang dinilai selama ini menyebarkan

“racun permusuhan.”

Sedangkan serangan teror lain terjadi di Perancis, persisnya di pabrik kimia Air Product, yang berlokasi di Isere, sekitar 25 kilometer selatan Lyon. Serangan ini menewaskan satu orang dan menyebabkan dua lainnya luka-luka, meski gagal meledakkan pabrik. Air Products belum lama ini mendapat kontrak dari perusahaan migas Aramco, untuk membangun dan mengoperasikan kompleks gas industri terbesar di dunia, di kawasan Jazan, Arab Saudi. Pelaku, Yassin Salhi (35), ditangkap setelah menabrakkan mobil ke dalam hanggar yang penuh tabung gas oksigen dan cairan kimia peluntur cat. Salhi juga



Sebuah foto yang diambil dari media sosial menunjukkan kondisi di dalam masjid Imam Al-Sadiq setelah ledakan besar yang menewaskan 28 jamaah.

membunuh atasannya, Herve Cornara (54), dengan memenggal kepalanya.

### Gejala Umum Serupa

Ketiga serangan teror yang hanya berselang dalam hitungan jam itu telah menewaskan lebih dari 60 orang dan membuat ratusan warga luka-luka. Dilihat dari pilihan sasaran dan taktik serangan berbeda-beda yang digunakan, tampaknya tidak ada hubungan langsung antara satu serangan dengan serangan yang lain.

Namun, dari sudut pandang tertentu, ketiga serangan ini mewakili gejala umum serupa, yang mendapat inspirasi –jika bukan keterlibatan langsung—dari kelompok ekstrem Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Apalagi ketiga serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah seorang juru bicara ISIS menyerukan kepada para pengikut ISIS, agar melakukan serangan-serangan selama bulan Ramadhan.

Para pakar Amerika Serikat menyatakan, ledakan kekerasan yang hampir serentak terjadi di tiga benua itu tampaknya meningkatkan kecemasan tentang daya jangkau serangan ISIS. Kelompok ekstrem itu tetap dipandang berfokus pada ambisi-ambisi regional di Irak dan Suriah, di mana ISIS mempertahankan cengkeramannya atas wilayah yang luas, meski akhir-akhir ini mengalami beberapa kekalahan militer.

Para pejabat AS berpendapat, ISIS tampaknya kurang terdorong untuk melancarkan persekongkolan terorisme jauh ke seberang lautan ketimbang organisasi Al-Qaeda dan afliasinya. Namun, ISIS juga semakin dipandang sebagai pusat dari gerakan yang sedang berkembang, di mana unsur-unsurnya yang terpisah sangat bervariasi. Mulai dari para pengikut lepas, yang tertarik oleh brutalitas ekstrem yang menjadi cap kelompok itu, sampai ke “waralaba-waralaba resmi” ISIS di Libya dan negara-negara lain, yang kondisi keamanannya merosot.

“Ia menjadi semakin meluas secara geografis dan tersebar secara ideologis,”

kata Bruce Hoffman, pakar terorisme di Universitas Georgetown. Dalam berbagai cara, menurut Hoffman, sifat tak berwujud dari jejaring itu membuatnya lebih sulit ditangkal ketimbang Al-Qaeda, yang sering mengerahkan hampir seperti kontrol gaya korporasi terhadap waralaba-waralaba regional dan persekongkolan teroris di berbagai penjuru dunia.

### Peringatan Setahun Kekhalifahan ISIS

Tampaknya tiga serangan ini dilakukan secara tidak terkoordinasi. Namun, media pertahanan HIS Jane’s sebelumnya telah memperkirakan, ada risiko yang meningkat bahwa akan terjadi serangan teror selama bulan suci Ramadhan, yang tahun ini dimulai pada 18 Juni. Aksi semacam ini sebelumnya pernah terjadi, namun kali ini perlu mendapat perhatian lebih karena periode Ramadhan tahun ini bertepatan dengan peringatan setahun deklarasi kekhalifahan ISIS.

ISIS cabang wilayah Najd (Provinsi Najd), sebuah kawasan yang mencakup Arab Saudi dan Teluk, sudah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di masjid Kuwait. Sedangkan keterlibatan, atau setidaknya tidaknya pengaruh ISIS, sangat mungkin terdapat pada kasus serangan di Tunisia. Frekuensi serangan yang meningkat juga menunjukkan tumbuhnya daya tarik ISIS dan seruanannya ke arah serangan kekerasan.

Serangan semacam itu tidak lantas berarti menunjukkan adanya peningkatan besar dari kemampuan pelaku yang sudah terbukti sebelumnya. Di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Australia, pola serangan itu tampaknya akan tetap dilakukan oleh pelaku tunggal atau kelompok yang sangat kecil, yang menggunakan serangan berkapabilitas rendah. Senjata yang digunakan bisa bahan peledak yang dimodifikasi secara kasar, namun lebih mungkin mereka menggunakan senjata api, pedang, dan wahana yang bertujuan menimbulkan korban.

Sedangkan di negara-negara yang memiliki populasi Muslim Syiah yang cukup signifikan, termasuk di Irak,

Kuwait, Pakistan, dan Yaman, serangan itu tampaknya akan berfokus ke aset-aset religius Syiah, seperti masjid dan tempat suci lain. Tujuannya adalah untuk semakin mengobarkan perpecahan yang sudah ada antara komunitas Muslim Sunni dan Syiah, guna memicu konflik sektarian lebih jauh.

### Mengeksploitasi Isu Sunni-Syiah

ISIS tampaknya cukup berhasil mengeksploitasi isu sektarian Arab Saudi, dalam rangka memperluas kehadirannya di kerajaan itu. Provinsi Timur di Saudi memiliki populasi mayoritas warga Syiah, dan serangan terhadap masjid-masjid Syiah di sana mungkin akan terjadi lagi. Dua serangan bom bunuh diri, yang diklaim dilakukan ISIS, sudah terjadi di dua masjid Syiah di provinsi itu pada 22 dan 29 Mei 2015. Tujuan serangan ini adalah menggoyahkan stabilitas Saudi dengan mengeksploitasi perpecahan antara warga Sunni yang mayoritas dan Syiah yang minoritas.

Untuk Tunisia dan Mesir, serangan-serangan teror tampaknya lebih ditujukan untuk merusak ekonomi, termasuk aset-aset pariwisata dan energi. Sebelum serangan “teror Ramadhan” terakhir, pada Maret 2015, dua lelaki bersenjata juga menembaki para pengunjung museum nasional di pusat kota Tunis, ibukota Tunisia, dan menewaskan 21 turis.

Di Somalia, Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (Al-Shabaab) juga meningkatkan serangannya sejak awal Ramadhan, dengan sasaran pasukan penjaga perdamaian dan pasukan keamanan domestik. Petugas keamanan Kenya dan Uganda pada Juni 2015 melaporkan, Al-Shabaab merencanakan serangan terhadap fasilitas pemerintah dan aset-aset komersial di Ethiopia, Kenya, Somalia, dan Uganda selama Ramadhan.

Alhasil, Ramadhan tahun ini dan mungkin Ramadhan di tahun-tahun mendatang berpotensi menjadi panggung aksi kekerasan yang tak berujung. Sebuah ironi yang menyedihkan. © Satrio Arismunandar

## Adik Tiri Sri Sultan HB X Dikukuhkan Menjadi Sri Sultan HB XI



Paguyuban Trah Ki Ageng Giring-Ki Ageng Pemanahan mengukuhkan adik tiri Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo, sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono XI.

Pengukuhan dilakukan karena alasan kekuasaan tahta Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kosong akibat Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja dengan mengganti gelarnya. Sabda Raja mengganti nama dan gelarnya menjadi Sultan Hamengku Bawaono Kesepuluh.

“Sejak adanya Sabda Raja 30 April 2015, tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami kekosongan,” kata Ketua Paguyuban Trah Ki Ageng Giring-Ki Ageng Pemanahan, Satria Djojonegoro, di Yogyakarta, Minggu (12/7).

Menurutnya, paguyuban yang dipimpinnya mengukuhkan Prabukusumo sebagai Sultan Hamengku Buwono XI berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, piagam Kedudukan Presiden tanggal 19 Agustus 1945, Laku Amanat Sultan IX tanggal 5 September 1945 dan

UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Pengukuhan ini sudah sesuai dengan angger-angger, budaya, paugeran dan adat istiadat di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,” kata Satria.

Pengukuhan berlangsung di Petilasan Kraton Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan pesanggrahan Sri Sultan Hamengku Buwono I.

“Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan adalah kakek moyang pendiri kerajaan Mataram,” jelas Satria.

Sebelum dikukuhkan, GBPH Prabukusumo diangkat menjadi putera mahkota dengan nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibya Raja Putra Narendra Mataram. Setelah itu barulah Prabukusumo dikukuhkan menjadi Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping XI (Sewelas) ing Ngayogyakarta Hadiningrat. /Zaenal Arifin-Ant

## Golput Ancam Pilkada Serentak di Bengkulu

Pilkada Serentak 2015 di Propinsi Bengkulu dihantui golput. Warga Desa Talang Aru, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam hajat demokrasi serentak di daerah pada 9 Desember 2015.

Penyebabnya, berbagai akses jalan di Desa Talang Aru dan jalan kabupaten setempat rusak parah. Akan tetapi kerusakan hingga bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki.

“Yang menjadi kekecewaan di Desa Talang Baru adalah infrastruktur jalan. Mayoritas masyarakat di Desa Talang Baru hendak golput dalam Pilkada,” kata Pejabat Camat Malin Deman Joni Iskandar, di Kecamatan Malin Deman, Mukomuko, Minggu (5/7).

Malin sudah menyampaikan kepada masyarakat agar mereka tetap menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak. Akan tetapi belum menemukan titik temu. Ke depan, pihaknya bersama pemerintah daerah setempat akan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. /Karel Stefanus Ratulangi-Ant





## Pemkab Kotawaringin Timur Larang Mobdin untuk Mudik

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melarang pegawainya menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran 2015. Pemkab akan memberikan sanksi bagi pegawai negeri sipil di lingkungannya yang membandel.

"Tidak ada toleransi. Tidak ada pengecualian. Kendaraan dinas tidak boleh dibawa mudik," tegas Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H Supian Hadi, di Sampit, Minggu (5/7).

Disampaikan, kendaraan dinas merupakan aset daerah yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan tugas sebagai kepegawaian. Sedangkan mudik lebaran merupakan kepentingan pribadi sehingga sudah seharusnya tidak menggunakan kendaraan dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat.

Pegawai negeri diharapkan sadar diri bahwa kendaraan dinas dipinjamkan dengan tujuan memperlancar tugas, bukan untuk kepentingan pribadi. Kebijakan ini untuk menghindari sorotan dari masyarakat atas penyalahgunaan aset daerah.

Supian memperingatkan agar larangan tersebut tidak dianggap hanya seremonial tiap menjelang Lebaran. Dia memastikan akan ada sanksi bagi pegawai negeri yang ngotot menggunakan kendaraan dinas untuk angkutan mudik.

"Taruh kendaraan dinasnya di kantor atau garasi masing-masing. Jangan dibawa untuk mudik," pungkasnya. /Karel Stefanus Ratulangi-Ant

## Jelang Lebaran, 1.187 Buruh di Jateng di PHK

Kota Semarang tercatat sebagai daerah tertinggi di Propinsi Jawa Tengah yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah. Angka PHK tercatat mencapai 390 perusahaan dari perusahaan besar, menengah dan kecil.

"Kabupaten Magelang (232), Kota Pekalongan (111 orang), Kabupaten Pekalongan (46), Kabupaten Batang (127), Kota Semarang (390)," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jateng, Wika Bintang, Selasa (7/7).

Selanjutnya Kota Solo (11), Kabupaten Sragen (151), Kabupaten Sukoharjo (9), dan Kabupaten



Wonosobo (12). PHK yang dilakukan perusahaan ini merupakan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak dan naiknya kurs harga dollar.

Selama periode bulan Juli 2015, Pemprop Jateng mencatat korban PHK mencapai 1.187 orang. Dengan rincian PHK penuh 660 karyawan, putus kontrak 151 karyawan, dirumahkan 46 orang, dan sisanya dalam proses tahapan PHK mencapai 234 orang.

"Untuk yang karyawan di rumahkan ada 46 orang. Saat ini masih kita mediasi di Kabupaten kota," jelas Wika.

Untuk kota dengan jumlah korban PHK-nya paling besar terjadi di Kabupaten Magelang yang mencapai 232 orang. Meskipun secara status mereka masih dalam proses PHK dari perusahaannya.

Salah satu solusi yang akan dilakukan adalah mengalihkan sejumlah karyawan ke salah satu perusahaan garmen di Kabupaten Boyolali. Perusahaan baru itu kini butuh tenaga kerja sebanyak 20 ribu karyawan dan baru terrealisasi 10 ribu. /Muhammad Dasuki-Karel Stefanus Ratulangi

## Hati-hati, Mudik di Jalur Pantura Jateng

Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menghimbau pemudik lebaran 2015 untuk berhati-hati ketika melintas di jalur Pantai Utara Jawa Tengah. Sebab banyak titik-titik rawan kecelakaan di jalur tersebut.

Tercatat jumlah titik rawan kecelakaan mencapai 106 titik. Adapun titik rawan kemacetan mencapai 113 titik.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Noer Ali, usai menggelar operasi Ketupat 2015 di Mapolda Jateng, Kamis (9/6), mengatakan, jumlah pemudik dari Jakarta ke Jawa Tengah diperkirakan mencapai 6,88 juta.

Jumlah mencakup para pemudik dengan menggunakan sepeda motor dan mobil yang hendak pulang kampung di wilayahnya maupun hanya sekedar melintas. /Muhammad Dasuki-Karel Stefanus Ratulangi



# Tamu

Wahyu Romadhony

**D**i mata budayawan, masa depan sebuah negeri bisa terbaca. Ia selalu melihat tanda alam. Merasakan getaran bumi. Mendengar suara batin manusia. Lantas kesemuanya itu ia sarikan. Kadang bisa muncul dalam bentuk sajak. Kadang cerpen, lukisan atau bahkan mungkin hanya renungan untuk dirinya sendiri. Karena ia tahu tidak semua manusia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang akan terjadi.

Begitu juga dengan Muhammad Ainun Nadjib. Ia yang biasa dipanggil Kyai Kanjeng sudah biasa membaca tanda jaman. Saat Presiden Soeharto mundur Emha menjadi salah satu dari segelintir tokoh yang dimintai saran oleh penguasa Orde Baru. Kalimatnya lantas dikutip oleh Soeharto dalam pengunduran dirinya "*Ora dadi presiden ora patheken*".

Emha selalu hadir saat bangsa ini gelisah. Ia lantas menjadi petunjuk arah rakyat yang sedang susah. Pendekatannya sederhana, seperti perilaku dan kesehariannya. Ia hanya ceramah atau bernyanyi. Menuangkan hasil renungan dirinya terhadap segala sesuatu yang terus berubah. Sekali waktu ia akan bicara agama. Disaat lain ia akan bicara tentang hidup atau mungkin bicara tentang politik.

Seperti bulan April lalu ketika ia berbicara di Bantul, Yogyakarta. Di sebuah majelis yang sudah lama ia bina, Emha bicara tentang politik. Dalam satu pembahasannya ia menyebutkan bahwa Indonesia akan dikuasai oleh seorang "tamu". Bukan Joko Widodo, bukan Megawati Soekarnoputri bukan pula anak Megawati yang menguasai Indonesia. Begitu ujarnya.

"Siapakah yang berkuasa? Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa," katanya.

Saat ini alih kekuasaan tersebut kata Emha sedang berlangsung. Kekuatan global begitu ia menyebutnya tengah memperebutkan Indonesia. Pria kelahiran Jombang itu mengatakan 5-10 tahun kedepan adalah pertarungan bagi Indonesia. "*Timik-timik* kembali menggeliat atau hancur sama sekali menjadi bangsa jongos total," ucapnya.

Pelan-pelan dihadapan majelis yang mendengarkannya dengan khusuk itu Emha membuka jatidiri calon penguasa dengan bahasa sastra yang halus. "Tapi yang pasti ada ras nya mereka. Yang paling bermain adalah orang-orang yang datang ke nusantara sejak abad ke 13. Tapi

sampai saat ini mereka berposisi sebagai tamu bagi rakyat Indonesia," ujarnya

"Coba nanti diskusikan di warung-warung kenapa ada orang yang datang ke Indonesia 13 abad tapi masih jadi tamu," katanya.

Tawa meledak manakala Emha mengulangi lagi kalimatnya. "Jadi ada orang yang sudah jadi penduduk Indonesia sudah kerja dan kaya raya tapi di hati penduduk Indonesia dia masih tamu, belum pantas makanya jadi Gubernur," ujarnya.

Padahal menurutnya sosok inilah yang nantinya akan diusung ke puncak kekuasaan oleh kekuatan ekonomi global yang ia sebut berasal dari Tiongkok Barat. Kelompok ini akan mengeruk ekonomi di Indonesia hanya untuk menguntungkan kelompoknya. Seketika mimik muka Emha menjadi amat serius.

"Saya ingin memperingatkan *koe isih dayo, koe ojo banget-banget lehmu pecicilan yo. Indonesia iki ojo rumangsamu mung koyo sing kok songko. Ono liyan-liyane loh dek Indonesia iku,*" ujarnya menggunakan bahasa Jawa kasar.

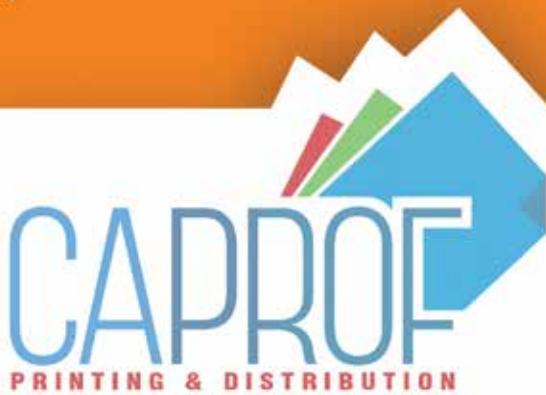
Emha tampak kesal. Tidak sukar menebak siapa yang dimaksud Emha. Majelis yang hadir malam itu pasti ragu menyebut nama Basuki Tjahja Purnama atau yang dikenal dengan sebutan Ahok. Lantas saya merenung benarkah Ahok.

Pria asal Bangka Belitung itu memang sedang melejit seperti roket. Saya jadi teringat akan cara kerjanya, gaya dan penampilanya yang keras, kasar dan tentu arogan. Basuki tak pernah takut dengan siapapun secara politik. Ia lawan Prabowo Subianto yang mengusungnya. Ia serang Menteri yang tak se ide dengannya. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono pernah diserangnya secara politik saat polemik Lurah Susi menekannya.

Tentu Basuki bukan orang biasa. Sekali waktu ia tantang orang Betawi di tanah kelahirannya. Bahkan dalam sejumlah momen politik, Presiden Joko Widodo kerap meminta sarannya. Seketika arah hadap politik internasional Indonesia condong ke Tiongkok.

Uang ratusan triliun akan dikirimkan ke Indonesia dari Negeri Panda. Sebentar kemudian ribuan imigran datang. Membangun jembatan, jalan layang, pelabuhan dan rumah-rumah. Sebelum akhirnya kita sadar sang tamu tak berniat lagi untuk pulang. ▀

🏠 Jl. Tebet Timur Dalam I No. 16 Tebet Jakarta Selatan  
✉ info@caprofpublishing.com - pemasaran.cpd@gmail.com  
☎ 081210592495



OUTDOOR . INDOOR . OFFSET . LAMP BOX NAME CARD . STICKER  
X BANNER . ROLL BANNER BROCHURE . CALENDAR . PACKAGING DESIGN  
MAGAZINE . TABLOID . BOOK . CATALOGUE PROPOSAL . COMPANY PROFILE

**PARTNER TERBAIK BISNIS KREATIF ANDA!**



## PT. LAZUARDI HARMONI TOUR

Umroh Trip



Event Organizer

Tour Package



Umroh & Travel Agency

Jl. Tebet Barat Dalam VI No. 8  
Tebet - Jakarta Selatan  
12810

✉ info@lazuarditour.com - lakhsmi\_p@yahoo.com  
☎ 021-8292931 / 081280675659  
📱 7FB3654F  
📞 081280675659





Refleksikan **energi baik** Ramadan  
dalam kehidupan sehari-hari

**Selamat Idul Fitri 1436 H**

Segenap Komisaris, Direksi, dan Karyawan PGN  
mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.



**#EnergiBaik**

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Contact Center  
**1500•645**  
[www.pgn.co.id](http://www.pgn.co.id)